**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



# I. PENDAHULUAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021.CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya.Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan.Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

## MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

## LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan AdministratifPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
31. (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

## SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN   1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan |
| BAB II | IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD  2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD  2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja |
| BAB III | PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD  3.1 Penjelasan Pos-posLaporan Realisasi Anggaran   1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Transfer 4. Pembiayaan   3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca   1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas   3.3Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional   1. Pendapatan Laporan Operasional 2. Beban 3. Kegiatan Non Operasional 4. Pos-pos Luar Biasa 5. Surplus (Defisit) LO   3.4Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas  3.5Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas  3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah |
| BAB IV | INFORMASI NON KEUANGAN |
| BAB V | PENUTUP |

# II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

## 2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuanganSKPD Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut.

### PENCAPAIAN KINERJA SKPD

Pada APBD Tahun 2021, Anggaran Belanja Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajangsebesar Rp1.091.766.643 dengan realisasi sebesar Rp1.009.982.728 terinci sebagai berikut:

**TabelIkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Kelurahan JogotrunanTahun 2021**

| **Tahun Anggaran** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** | **Sisa Anggaran** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Rp.1.000.984.000 | Rp. 979.560.005 | 97,86 | Rp. 21.423.995 |
| 2020 | Rp.1.123.610.293 | Rp. 1.058.940.912 | 94,24 | Rp. 64.669.381 |
| 2021 | Rp.1.091.766.643 | Rp. 1.009.982.728 | 92,51 | Rp. 81.783.915 |

.

### BELANJA DAERAH

Belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Lumajang Kelurahan Jogotrunan meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai.Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel1Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Belanja** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%** | **Sisa Anggaran (Rp)** |
| 1 | Belanja Operasi | 1.076.870.443 | 995.086.638 | 92,41 | 81.783.805 |
| 2 | Belanja Modal | 14.896.200 | 14.896.090 | 100 | 110 |
|  | **Jumlah Belanja** | 1.091.766.643 | 1.009.982.728 | 92,51 | 81.783.915 |

### 

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 3Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 - 2021**

| **Belanja** | **2019** | **2020** | **2021** |
| --- | --- | --- | --- |
| Belanja Pegawai | 14.020.000 | 26.270.000 | 20.804.760 |
| Belanja Barang | 781.142.098 | 801.301.912 | 974.281.878 |
| Belanja Modal | 57.783.000 | 37.716.000 | 14.896.090 |
| **Jumlah** | **979.560.005** | **1.058.940.912** | **1.009.982.728** |
| % | 97,86 | 94,24 | 92,51 |

Berdasarkan Tabel. 3 diatas diketahui bahwa terdapat penurunan Jumlah belanja antara tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2020 terdapat penurunan belanja sebesar 94,24 % dari belanja tahun 2019,adapun hal ini disebabkan pada tahun 2020 masih berkelanjutannya pandemi Covid 19 sehingga berakibat pada pembatasan kegiatan yang mengundang masyarakat. Dan terdapat penurunan prosentase belanja pada tahun 2021 sebesar 92,51 % di karenakan adanya pandemi Covid 19 yang belum selesai yang berakibat kegiatan – kegiatan yang mengundang masyarakat masih dibatasi.

## 2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program pada tahun 2021 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1 | : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Jenis Belanja | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Keterangan |
| Belanja Pegawai | | 21.504.760 | 20.804.760 |  |
| Belanja Barang & Jasa | | 299.596338 | 253.539.378 |  |
| Belanja Modal | | 13.906.200 | 13.906.090 |  |
| Jumlah | | 335.007.298 | 288.250.228 |  |
| Program 2 | : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Jenis Belanja | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Keterangan |
| Belanja Pegawai | | - | - |  |
| Belanja Barang & Jasa | | 739.344.345 | 705.792.500 |  |
| Belanja Modal | | 990.000 | 990.000 |  |
| Jumlah | | 740.334.345 | 706.782.500 |  |
| Program 3 | : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Jenis Belanja | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Keterangan |
| Belanja Pegawai | | - | - |  |
| Belanja Barang & Jasa | | 16.425.000 | 14.950.000 |  |
| Belanja Modal | | - | - |  |
| Jumlah | | 16.425.000 | 14.950.000 |  |

## 2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Lumajang Kelurahan Jogotrunan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel1 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2019 s.d. 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Posisi Keuangan** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Aset | 1.680.825.667,59 | 1.858.154.947,65 | 1.819.228.295,21 |
| Kewajiban | 759.660 | 973.390 | 557.135 |
| Ekuitas | 1.857.181.557,65 | 1.680.066.007,59 | 1.818.671.160,21 |
| Jumlah Kewajiban & Ekuitas | 1.858.154.947,65 | 1.680.825.667,59 | 1.819.228.295,21 |

## 2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJAKEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

### 2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan dan motifasi untuk melaksanakan tugas, sehingga penerapan “ the right man on rthe right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Secara umum ada dua pilihan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, pertama dengan melakukan perekrutan tenaga baru baik melalui jalur seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga yang dikontrak dalam periode tertentu guna mendukung kinerja SKPD, tentunya dengan kualifikasi sesuai kebutuhan yang pastinya harus diawali dengan proses analisa kebutuhan pegawai yang cermat dan teliti dan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan SKPD sebgai user. Solusi ini mempunyai kelebihan yaitu tenaga baru yang telah direkrut cenderung memiliki idealisme serta motifasi yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan maupun pengingkaran dari tugas dan kewajiban bisa diminimalkan.

Pilihan solusi kedua adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/propinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenanggannya.

**2.4.2Masalah Sarana dan Prasarana**

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya SKPD Kecamatan Lumajang - Kelurahan Jogotrunan berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

### 2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu syarat untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai efektifitas dan efesiensi target kinerja keuangan adalah adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Sistem pengedalian intern yang memadai akan dapat menjamin adanya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan serta terlindunginya aset-aset pemerintah daerah. Permasalahannya adalah bahwa sampai dengan saat ini peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang mengatur sistem pengendalian intern untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah masih belum ada.Namun demikian, dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja keuangan pengendalian tetap dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja keuangan tetap terpenuhi.

# III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |
| 1. **Pendapatan****Asli Daerah** | **........................** |  | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang dipungut oleh SKPD .......... terdiri dari:

* ......
* ......
* .......

***(Uraiakan jenis pajak/retribusi/lain-lain PAD yang dipungut oleh SKPD ybs)***

Rincian realisasi PAD tahun 2021 dan 2020sebagai berikut.

Tabel 1 : Rincian Realisasi PAD tahun 2021 dan 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Jenis Pendapatan** | **Anggaran 2021** | **Realisasi** | | | **Kenaikan** | **%** |
| **2021** | **%** | **2020** | **(Penurunan)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=4(6 | 8=7/6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |
| 1. **Pajak Daerah** | **....................** |  | **....................** |  | **………………..** |

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Lumajang meliputi 10 (sepuluh) jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan realisasi sebegai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020**  *dalam rupiah* | | | | | | | |
| **NO** | **Jenis Pendapatan** | **Anggaran 2021** | **Realisasi** | | | **Kenaikan** | **%** |
| **2021** | **%** | **2020** | **(Penurunan)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=4-6 | 8=7/6 |
| 1 | Pajak Hotel | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |
| 2 | Pajak Restoran | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |
| 3 | Pajak Hiburan | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |
| 4 | Pajak Reklame | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |
| 6 | Pajak Parkir | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |
| 7 | Pajak Air Tanah | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |
| 8 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |
| 9 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |
| 10 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |
|  | **Jumlah Pendapatan** | ...................... | ...................... | ...... | ...................... | ...................... | ...... |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |
| 1. **Retribus****i Daerah** | **..........................** |  | **............................** |  | **............................** |

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan/keramaian dan retribusi ijin trayek.

Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2021 dan 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel 22 berikut ini.

**Tabel3.Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **NO** | **Jenis Pendapatan** | **Anggaran 2021** | **Realisasi** | | | **Kenaikan** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **%** | **2020** | **(Penurunan)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=4-6 | 8=7/6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 5 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 6 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 7 | Retribusi Pelayanan Tera Ulang | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 8 | Retribusi pemakaian kekayaan daerah | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 9 | Retribusi Terminal | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 10 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 11 | Retribusi Rumah Potong Hewan | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 12 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 13 | Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 14 | Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
| 15 | Retribusi Ijin Trayek | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |
|  | **Jumlah** | ...................... | ...................... | ....... | ...................... | ...................... | ....... |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi**  **TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |
| 1. **Lain-lain PADyang Sah** | **.....................** |  | **.....................** |  | **.....................** |

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.

RealisasiLain-lain PAD yang sah tahun 2021 terinci dalam tabel berikut.

**Tabel4.Realisasi Anggaran Pendapatan Lain - Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **NO.** | **Jenis Pendapatan** | **Anggaran 2021** | **Realisasi** | | | **Kenaikan** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **%** | **2020** | **(Penurunan)** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=4-6 | 8=7/6 |
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penerimaan Jasa Giro |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Penerimaan Deposito |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tuntutan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pendapatan Denda Pajak |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pendapatn Hasil Eksekusi Atas Jaminan |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pendapatan BLUD RSUD Dr. Haryoto |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pendapatan BLUD Akper Pemkab Lumajang |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pendapatan Sewa |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pendapatan dari Siaran |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dana Kapitasi JKN |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pendapatan Denda Sewa |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sumbangan Pihak ke III |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Penerimaan Lain-lain |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pendapatan Dana BOS |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pendapatan Bunga Dana BOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |
| Belanja Daerah | **1.091.766.643** |  | **1.009.982.728** |  | **1.058.940.912** |

Belanja daerah SKPD Kecamatan LumajangKelurahan Jogotrunanmeliputi belanja operasi dan belanja modal.Realisasi belanja tahun 2021sebesar Rp. 1.009.982.728. Realisasinya mencapai 92,51% dari anggaran sebesar Rp 1.091.766.643 Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja Tahun 2021turun1,73%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |
| 2) Belanja Operasi | **1.076.870.443** |  | **995.086.638** |  | **827.571.912** |

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

**Tabel : 1. Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Belanja Operasi** | **Anggaran 2021 (Rp)** | **Realisasi 2021 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2020** |
| 1 | Belanja Pegawai | 21.504.760 | 20.804.760 | 96,74% | 26.270.000 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.055.365.683 | 974.281.878 | 92,32% | 801.301.912 |
|  | **Jumlah** | **1.076.870.443** | **995.086.638** | **92,41%** | **827.571.912** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |
| **Belanja****Pegawai** | **21.504.760** |  | **20.804.760** |  | **26.270.000** |

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan LumajangKelurahan Jogotrunan.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

**Tabel : 2. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021**

| **No** | **Rincian Belanja Pegawai** | **Anggaran 2021** | **Realisasi**  **2021** | **%** | **Realisasi 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** |  |  |  |  |
| 1 | Gaji pokok PNS / uang representasi |  |  |  |  |
| 2 | Tunjangan keluarga |  |  |  |  |
| 3 | Tunjangan jabatan |  |  |  |  |
| 4 | Tunjangan fungsional |  |  |  |  |
| 5 | Tunjangan fungsional umum |  |  |  |  |
| 6 | Tunjangan beras |  |  |  |  |
| 7 | Tunjangan PPh/tunjangan khusus |  |  |  |  |
| 8 | Pembulatan gaji |  |  |  |  |
|  | Jumlah belanja pegawai tidak langsung |  |  |  |  |
|  | **BELANJA LANGSUNG** |  |  |  |  |
| 1 | Honorarium PNS | 21.504.760 | 17.337.300 | 96,74 | 23.032.000 |
| 2 | Uang lembur PNS |  |  |  | 3.238.000 |
|  | Jumlah Belanja Pegawai Langsung |  |  |  |  |
|  | Jumah Belanja Pegawai |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |
| **Belanja****Barang dan Jasa** | **1.055.365.683** |  | **974.281.878** |  | **456.958.152** |

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel : 3 Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Belanja Barang dan Jasa** | **Anggaran 2021** | **Realisasi 2021** | **Realisasi 2020** |
| 1 | Belanja Persediaan |  | 412.314.370 | 307.282.601 |
| 2 | Belanja Jasa |  | 536.154.008 | 122.834.775 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 14.950.000 | 6.163.500 | 16.837.245 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 44.880.000 | 19.650.000 | 9.003.531 |
| 5 | Belanja Lainnya | - | - | 1.000.000 |
|  | **Jumlah** |  | **974.281.878** | **456.958.152** |

###### **Belanja Persediaan**

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga.Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.412.314.370,- terinci sebagai berikut.

**Tabel : 1 Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2021**

| **No.** | **Belanja Persediaan** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja alat tulis kantor | 16.239.630 | 16.239.630 |
| 2 | Belanja cetak | 9.868.590 | 3.676.600 |
| 3 | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) | 1.811.040 | 860.800 |
| 4 | Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih |  |  |
| 6 | Belanja bahan bakar minyak/gas | 10.449.000 | 8.088.060 |
| 7 | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran |  |  |
| 8 | Belanja pengisian tabung gas |  |  |
| 9 | Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai |  |  |
| 10 | Belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman sekali pakai |  |  |
| 11 | Belanja peralatan bangunan sekali pakai |  |  |
| 12 | Belanja peralatan perikanan sekali pakai |  |  |
| 13 | Belanja cinderamata |  |  |
| 14 | Belanja alat olah raga habis pakai |  |  |
| 15 | Belanja karangan bunga/bunga tabur |  |  |
| 16 | Belanja pakan ikan/ternak |  |  |
| 17 | Belanja pupuk |  |  |
| 18 | Belanja make up |  |  |
| 19 | Belanja umbul(umbul/bendera |  |  |
| 20 | Belanja spanduk/baliho/banner |  |  |
| 21 | Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai |  |  |
| 22 | Belanja bahan baku bangunan |  |  |
| 23 | Belanja bahan/bibit tanaman |  |  |
| 24 | Belanja bibit ternak |  |  |
| 25 | Belanja bahan obat(obatan |  |  |
| 26 | Belanja bahan kimia |  |  |
| 27 | Belanja bahan makanan |  |  |
| 28 | Belanja bahan sandang |  |  |
| 29 | Belanja bahan baku praktek/pelatihan |  |  |
| 30 | Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek |  |  |
| 31 | Belanja bahan/sampel uji lab |  |  |
| 32 | Belanja cetak |  |  |
| 33 | Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan |  |  |
| 34 | Belanja makanan dan minuman rapat | 316.125.000 | 298.650.000 |
| 35 | Belanja makanan dan minuman tamu |  |  |
| 36 | Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu |  |  |
| 37 | Belanja makanan dan minuman pasien |  |  |
| 38 | Belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah |  |  |
| 39 | Belanja pakaian sipil harian (PSH) |  |  |
| 40 | Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) |  |  |
| 41 | Belanja pakaian dinas harian (PDH) |  |  |
| 42 | Belanja pakaian dinas upacara (PDU) |  |  |
| 43 | Belanja pakaian sipil resmi (PSR) |  |  |
| 44 | Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) |  |  |
| 45 | Belanja pakaian kerja lapangan |  |  |
| 46 | Belanja pakaian adat daerah |  |  |
| 47 | Belanja pakaian batik tradisional | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 48 | Belanja pakaian olah raga | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 49 | Belanja pakaian seragam |  |  |
| 50 | Belanja pakaian kegiatan tertentu |  |  |
| 51 | Belanja bahan lainnya | 13.719.255 | 13.499.280 |
| 52 | Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 59.201.120 | 59.200.000 |
| 53 | Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (barang jadi) |  |  |
| 54 | Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang |  |  |
|  | **Jumlah** | **439.513.635** | **412.314.370** |

###### **Belanja Jasa**

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.536.154.008dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel : 1 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021**

| **No** | **Belanja jasa** | **Anggaran 2021** | **Realisasi 2021** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja telepon | 1.224.000 | 833.721 |
| 2 | Belanja air | 1.170.000 | 804.250 |
| 3 | Belanja listrik | 13.932.048 | 7.572.500 |
| 4 | Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang |  |  |
| 5 | Belanja surat kabar/majalah | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 6 | Belanja kawat/faksimili/internet | 5.520.000 | 4.984.209 |
| 7 | Belanja lembur | 46.542.000 | 38.955.000 |
| 8 | Belanja iuran jaminan kesehatan non asn | 10.560.000 | 9.515.040 |
| 9 | Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja non asn | 804.000 | 659.288 |
| 10 | Belanja iuran jaminan kematian non asn | 360.000 | 180.000 |
| 11 | Belanja jasa siaran radio |  |  |
| 12 | Belanja jasa transportasi/akomodasi |  |  |
| 13 | Belanja dokumentasi |  |  |
| 14 | Belanja dekorasi |  |  |
| 15 | Belanja jasa tera/kir |  |  |
| 16 | Belanja jasa promosi/publikasi/advertising |  |  |
| 17 | Belanja jasa gelombang radio/televisi |  |  |
| 18 | Belanja jasa pemeliharaan kesehatan bupati/wakil bupati |  |  |
| 19 | Belanja jasa uji laboratorium |  |  |
| 20 | Belanja jasa pengolahan sampah | 600.000 | 550.000 |
| 21 | Belanja pajak bumi dan bangunan |  |  |
| 22 | Belanja pajak air tanah |  |  |
| 23 | Belanja jasa tenaga keamanan |  |  |
| 24 | Belanja penggantian transport |  |  |
| 25 | Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli |  |  |
| 26 | Belanja jasa pendukung kegiatan |  |  |
| 27 | Belanja jasa laundry |  |  |
| 28 | Belanja jasa administrasi pemungutan PBB P2 |  |  |
| 29 | Belanja jasa juri/wasit |  |  |
| 30 | Belanja jasa petugas korsik dan drum band |  |  |
| 31 | Belanja jasa penata rias/make up |  |  |
| 32 | Belanja jasa event organizer |  |  |
| 33 | Belanja jasa fumigasi |  |  |
| 34 | Belanja jasa siaran televisi |  |  |
| 35 | Belanja jasa pembuatan video |  |  |
| 36 | Belanja jasa kalibrasi alat kesehatan |  |  |
| 37 | Belanja jasa pengolahan limbah medis |  |  |
| 38 | Belanja jasa pemeliharaan kesehatan DPRD |  |  |
| 39 | Belanja jasa penyelenggaraan diklat |  |  |
| 40 | Belanja jasa sewa pengharum ruangan |  |  |
| 41 | Belanja retribusi pelayanan persampahan |  |  |
| 42 | Belanja jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi |  |  |
| 43 | Belanja premi asuransi kesehatan |  |  |
| 44 | Belanja premi asuransi ketenagakerjaan |  |  |
| 45 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat |  |  |
| 46 | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan |  |  |
| 47 | Belanja sewa tanah/lahan |  |  |
| 48 | Belanja sewa penginapan |  |  |
| 49 | Belanja sewa sarana mobilitas darat |  |  |
| 50 | Belanja sewa eskavator |  |  |
| 51 | Belanja sewa mesin proses |  |  |
| 52 | Belanja sewa electric generating set |  |  |
| 54 | Belanja sewa alat kantor |  |  |
| 55 | Belanja sewa alat rumah tangga |  |  |
| 56 | Belanja sewa komputer |  |  |
| 57 | Belanja sewa meja dan kursi |  |  |
| 58 | Belanja sewa alat studio |  |  |
| 59 | Belanja sewa barang bercorak kebudayaan |  |  |
| 60 | Belanja sewa tenda dan perlengkapannya |  |  |
| 61 | Belanja beasiswa tugas belajar S1 |  |  |
| 62 | Belanja beasiswa tugas belajar S2 |  |  |
| 63 | Belanja kursus(kursus singkat/pelatihan |  |  |
| 64 | Belanja sosialisasi |  |  |
| 65 | Belanja bimbingan teknis |  |  |
| 66 | Belanja pendidikan struktural |  |  |
| 67 | Belanja fit and proper test |  |  |
| 68 | Belanja jasa konsultansi penelitian |  |  |
| 69 | Belanja jasa konsultansi perencanaan |  |  |
| 70 | Belanja jasa konsultansi pelaporan |  |  |
| 71 | Belanja jasa konsultansi pengawasan |  |  |
| 72 | Belanja jasa konsultansi hukum |  |  |
| 73 | Belanja jasa konsultansi IT |  |  |
| 74 | Belanja jasa konsultansi evaluasi |  |  |
| 75 | Belanja jasa konsultansi psikologi |  |  |
| 76 | Belanja jasa tenaga administrasi | 309.600.000 | 309.600.000 |
| 77 | Belanja jasa tenaga keamanan | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 78 | Belanja jasa tenaga kebersihan | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 79 | Belanja jasa penyelenggara acara | 124.600.000 | 123.800.000 |
| 80 | Belanja upah/ongkos tenaga pendidik |  |  |
| 81 | Belanja tambahan upah tenaga kerja pendidik |  |  |
| 82 | Belanja Barang dan Jasa pada BLUD |  |  |
| 83 | Belanja kursus(kursus singkat/pelatihan |  |  |
| 84 | Belanja bimbingan teknis |  |  |
| 85 | Belanja praktek industri |  |  |
| 86 | Belanja Praktek Klinik |  |  |
| 87 | Belanja Ujian |  |  |
| 88 | Belanja peta |  |  |
| 89 | Belanja operasional pemeriksaan internal reguler |  |  |
| 90 | Belanja Jasa Dana BOS |  |  |
|  | **Jumlah** | **553.612.048** | **536.154.008** |

###### **Belanja Pemeliharaan**

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.6.163.500 terinci sebagai berikut:

**Tabel : 1 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021**

| **No** | **Belanja Pemeliharaan** | **Anggaran 2021** | **Realisasi 2021** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja bahan bakar minyak dan pelumas |  |  |
| 2 | Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang |  |  |
| 3 | Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional |  |  |
| 4 | Belanja STNK kendaraan dinas/operasional |  |  |
| 5 | Belanja pemeliharaan grader |  |  |
| 6 | Belanja pemeliharaan excavator |  |  |
| 7 | Belanja pemeliharaan asphal equipment |  |  |
| 8 | Belanja pemeliharaan electric generating set |  |  |
| 9 | Belanja pemeliharaan pompa |  |  |
| 10 | Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor perorangan |  |  |
| 11 | Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor berpenumpang |  |  |
| 12 | Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor angkutan barang |  |  |
| 13 | Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor khusus |  |  |
| 14 | Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua | 4.500.000 | 2.232.500 |
| 15 | Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda tiga |  |  |
| 16 | Belanja pemeliharaan kendaraan tak bermotor angkutan barang |  |  |
| 17 | Belanja pemeliharaan alat angkut apung bermotor berpenumpang |  |  |
| 18 | Belanja pemeliharaan alat angkut apung tak bermotor berpenumpang |  |  |
| 19 | Belanja pemeliharaan alat kalibrasi |  |  |
| 20 | Belanja pemeliharaan alat ukur lainnya |  |  |
| 21 | Belanja pemeliharaan alat prosesing |  |  |
| 22 | Belanja pemeliharaan alat pemeliharaan tanaman |  |  |
| 23 | Belanja pemeliharaan mesin tik |  |  |
| 24 | Belanja pemeliharaan alat reproduksi (pengganda) |  |  |
| 25 | Belanja pemeliharaan alat penyimpanan perlengkapan kantor |  |  |
| 26 | Belanja pemeliharaan office use |  |  |
| 27 | Belanja pemeliharaan meubelair |  |  |
| 28 | Belanja pemeliharaan alat pembersih |  |  |
| 29 | Belanja pemeliharaan alat pendingin | 3.000.000 | 1.075.000 |
| 30 | Belanja pemeliharaan alat dapur |  |  |
| 31 | Belanja pemeliharaan home use |  |  |
| 32 | Belanja pemeliharaan alat pemadam kebakaran |  |  |
| 33 | Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan |  |  |
| 34 | Belanja pemeliharaan personal komputer | 4.200.000 | 875.000 |
| 35 | Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer | 3.250.000 | 1.890.000 |
| 36 | Belanja pemeliharaan peralatan jaringan |  |  |
| 37 | Belanja pemeliharaan kursi kerja pejabat |  |  |
| 38 | Belanja pemeliharaan peralatan studio visual |  |  |
| 39 | Belanja pemeliharaan peralatan studio video dan film |  |  |
| 40 | Belanja pemeliharaan alat komunikasi telephone |  |  |
| 41 | Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio SSB |  |  |
| 42 | Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM |  |  |
| 43 | Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio VHF |  |  |
| 44 | Belanja pemeliharaan alat kedokteran umum |  |  |
| 45 | Belanja pemeliharaan alat kedokteran gigi |  |  |
| 46 | Belanja pemeliharaan alat rontgen |  |  |
| 47 | Belanja pemeliharaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan |  |  |
| 48 | Belanja pemeliharaan alat kesehatan perawatan |  |  |
| 49 | Belanja pemeliharaan alat kesehatan olah raga |  |  |
| 50 | Belanja pemeliharaan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi |  |  |
| 51 | Belanja pemeliharaan alat laboratorium aspal cat & kimia |  |  |
| 52 | Belanja pemeliharaan alat laboratorium mekanik tanah dan batuan |  |  |
| 53 | Belanja pemeliharaan alat laboratorium umum |  |  |
| 54 | Belanja pemeliharaan alat laboratorium kedokteran |  |  |
| 55 | Belanja pemeliharaan alat laboratorium fisika |  |  |
| 56 | Belanja pemeliharaan alat laboratorium pertanian |  |  |
| 57 | Belanja pemeliharaan alat laboratorium biologi |  |  |
| 58 | Belanja pemeliharaan alat laboratorium lingkungan |  |  |
| 59 | Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor |  |  |
| 60 | Belanja pemeliharaan bangunan kesehatan |  |  |
| 61 | Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat ibadah |  |  |
| 62 | Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan |  |  |
| 63 | Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat olah raga |  |  |
| 64 | Belanja pemeliharaan bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar |  |  |
| 65 | Belanja pemeliharaan bangunan stasiun bus |  |  |
| 66 | Belanja pemeliharaan bangunan gedung perpustakaan |  |  |
| 67 | Belanja pemeliharaan bangunan pengujian kelaikan |  |  |
| 68 | Belanja pemeliharaan bangunan taman/wisata/rekreasi |  |  |
| 69 | Belanja pemeliharaan rumah negara golongan I |  |  |
| 70 | Belanja pemeliharaan rumah negara golongan II |  |  |
| 71 | Belanja pemeliharaan rumah negara golongan III |  |  |
| 72 | Belanja pemeliharaan flat/rumah susun |  |  |
| 73 | Belanja pemeliharaan bangunan bersejarah |  |  |
| 74 | Belanja pemeliharaan tugu/tanda batas |  |  |
| 75 | Belanja pemeliharaan rambu bersuar |  |  |
| 76 | Belanja pemeliharaan jalan kabupaten/kota |  |  |
| 77 | Belanja pemeliharaan penunjang jalan kabupaten/kota |  |  |
| 78 | Belanja pemeliharaan jembatan kabupaten/kota |  |  |
| 79 | Belanja pemeliharaan bangunan pembawa irigasi |  |  |
| 80 | Belanja pemeliharaan bangunan pengaman air kotor |  |  |
| 81 | Belanja pemeliharaan air tanah dalam |  |  |
| 82 | Belanja pemeliharaan instalasi air tanah dangkal |  |  |
| 83 | Belanja pemeliharaan instalasi air buangan domestik |  |  |
| 84 | Belanja pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik |  |  |
| 85 | Belanja pemeliharaan instalasi gardu listrik induk |  |  |
| 86 | Belanja pemeliharaan jaringan transmisi |  |  |
| 87 | Belanja pemeliharaan jaringan distribusi |  |  |
| 88 | Belanja pemeliharaan jaringan telepon di atas tanah |  |  |
| 89 | Belanja pemeliharaan barang-barang perpustakaan |  |  |
| 90 | Belanja pemeliharaan barang bercorak kebudayaan |  |  |
| 91 | Belanja pemeliharaan tanaman |  |  |
| 92 | Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud |  |  |
| 93 | Belanja pemeliharaan taman |  |  |
| 94 | Belanja Pemeliharaan Dana BOS |  |  |
|  | **Jumlah** | **14.950.000** | **6.163.500** |

###### **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.19.650.000 terincisebagai berikut.

**Tabel : 1Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Belanja Perjalanan Dinas** | **Anggaran 2021** | **Realisasi 2021** |
| 1 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 39.000.000 | 17.550.000 |
| 2 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 5.880.000 | 2.100.000 |
|  | **Jumlah** | **44.880.000** | **19.650.000** |

###### **Belanja Lainnya**

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.0,- terinci sebagai berikut.

**Tabel : 1Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2021**

| **No** | **Belanja Lainnya** | **Anggaran 2021** | **Realisasi 2021** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja pompa |  |  |
| 2 | Belanja kendaraan tak bermotor angkutan barang |  |  |
| 3 | Belanja perkakas konstruksi logam yang berpindah |  |  |
| 4 | Belanja perkakas bengkel listrik |  |  |
| 5 | Belanja perkakas standar (standart tool) |  |  |
| 6 | Belanja perkakas bengkel kerja |  |  |
| 7 | Belanja alat ukur universal |  |  |
| 8 | Belanja alat ukur/pembanding |  |  |
| 9 | Belanja alat ukur lainnya |  |  |
| 10 | Belanja alat timbangan |  |  |
| 11 | Belanja alat pengolahan tanah dan tanaman |  |  |
| 12 | Belanja alat-alat peternakan |  |  |
| 13 | Belanja alat pemeliharaan tanaman |  |  |
| 14 | Belanja mesin hitung/jumlah |  |  |
| 15 | Belanja alat penyimpanan perlengkapan kantor |  |  |
| 16 | Belanja office use |  |  |
| 17 | Belanja meubelair |  |  |
| 18 | Belanja alat pengukur waktu |  |  |
| 19 | Belanja alat pembersih |  |  |
| 20 | Belanja alat pendingin |  |  |
| 21 | Belanja alat dapur |  |  |
| 22 | Belanja home use |  |  |
| 23 | Belanja alat pemadam kebakaran |  |  |
| 24 | Belanja komputer unit/jaringan |  |  |
| 25 | Belanja personal komputer |  |  |
| 26 | Belanja peralatan personal komputer |  |  |
| 27 | Belanja peralatan jaringan |  |  |
| 28 | Belanja alat komunikasi telephone |  |  |
| 29 | Belanja alat kedokteran umum |  |  |
| 30 | Belanja alat kedokteran gigi |  |  |
| 31 | Belanja alat kedokteran mata |  |  |
| 32 | Belanja alat kedokteran THT |  |  |
| 33 | Belanja alat farmasi |  |  |
| 34 | Belanja alat kedokteran bedah |  |  |
| 35 | Belanja alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan |  |  |
| 36 | Belanja alat kedokteran gawat darurat |  |  |
| 37 | Belanja alat laboratorium umum |  |  |
| 38 | Belanja alat laboratorium kedokteran |  |  |
| 39 | Belanja alat laboratorium hematologi |  |  |
| 40 | Belanja alat laboratorium biologi |  |  |
| 41 | Belanja alat peraga bidang studi IPA Menengah |  |  |
| 42 | Belanja alat peraga bidang studi Olah Raga |  |  |
| 43 | Belanja alat peraga/praktek kerja |  |  |
| 44 | Belanja alat keamanan |  |  |
| 45 | Belanja bangunan gedung kantor |  |  |
| 46 | Belanja bangunan kerangka reklame |  |  |
| 47 | Belanja rambu bersuar |  |  |
| 48 | Belanja rambu tidak bersuar |  |  |
| 49 | Belanja buku umum |  |  |
| 50 | Belanja buku agama |  |  |
| 51 | Belanja koran |  |  |
| 52 | Belanja alat kesenian |  |  |
| 53 | Belanja alat olah raga |  |  |
| 54 | Belanja Alat Olah Raga Lainnya |  |  |
| 55 | Belanja binatang ikan |  |  |
| 56 | Belanja alat kesehatan olah raga |  |  |
| 57 | Belanja Lainnya Dana BOS |  |  |
|  | **Jumlah** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2021**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |
| BelanjaModal | **14.896.200** |  | **14.896.090** |  | **231.369.000** |

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel : 1 Realisasi Belanja Modal Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Belanja Modal** | **Anggaran 2021 (Rp)** | **Realisasi 2021**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi 2019 (Rp)** |
| 1 | Belanja Modal Tanah |  |  |  |  |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.896.200 | 14.896.090 | 100 | 37.716.000 |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  |  |
| 4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan |  |  |  |  |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |  |  |  |  |
| 6 | Belanja Modal Aset Lainnya |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **14.896.200** | **14.896.090** | **100** | **37.716.000** |

Pada Tahun 2021 Kelurahan Jogotrunan menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 14.896.200, - dengan rincian belanja modal yang terdiri dari Belanja Modal 1 unit Printer , 1 unit Komputer, 1 unit Handsprayer.Adapun realisasinya Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 14.896.090.Dengan demikian Belanja Modal Kelurahan Jogotrunan memperoleh prosentase sebesar 100% pada Tahun20213.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

### ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas,piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **31 Desember 2021** | **31 Desember 2020** |
| Kas di bendahara pengeluaran |  |  |
| Kas di bendahara penerimaan |  |  |
| Kas lainnya |  |  |
| Piutang pajak |  |  |
| Piutang retribusi |  |  |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih |  |  |
| Biaya Dibayar Dimuka |  |  |
| Persediaan | 2.062.940 | 1.326.000 |
| **Jumlah** | **2.062.940** | **1.326.000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | **0,00** |  | **0,00** |

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 1Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 dan 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN** | | **2021 (Rp)** | | | **2020 (Rp)** | |
| 1. Saldo 31 Desember | | 0 | | | 0 | |
| 1. Peneriman : | |  | | |  | |
| * SP2D UP | | 60.000.000 | | | 60.000.000 | |
| * SP2D TUP | | 70.984.630 | | | 40.995.850 | |
| * SP2D GU | | 771.112.783 | | | 751.030.177 | |
| * Penerimaan PFK | | - | | | - | |
| Jumlah Penerimaan | | 902.097.413 | | | 852.026.027 | |
| 1. Pengeluaran : | |  | | |  | |
| * SPJ UP/GU | | 771.112.783 | | | 751.030.177 | |
| * SPJ GU Nihil | | 59.970.275 | | | 59.967.935 | |
| * SPJ TU NIHIL | | 70.984.630 | | | 40.995.850 | |
| * Setor kembali sisa UP/GU | | 29.725 | | | 32.065 | |
| * Pengeluaran PFK | | - | | | - | |
| * Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu | | - | | | - | |
| Jumlah pengeluaran | | 902.097.413 | | | 852.026.027 | |
| 1. Saldo 31 Desember | | 0 | | | 0 | |
|  | | **31 Desember 2021**  **(Rp)** | |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | **........................** | |  | **........................** | |

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020.

SaldoKas di Bendahara Penerimaan per31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. ...........danRp.......Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel 1 : Rincian saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2021

| Bulan | Saldo awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Januari |  |  |  |  |
| Pebruari |  |  |  |  |
| Maret |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |
| Mei |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |
| Agustus |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |
| Nopember |  |  |  |  |
| Desember |  |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Kas Lainnya | **........................** |  | **........................** |

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler per31 Desember 2020 yang dikelola langsung oleh Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 : Mutasi kas lainnya tahun 2021 dan 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2021** | **2020** |
| 1 | Pendapatan Dana BOS |  |  |
| 2 | Pengeluaran Belanja BOS : |  |  |
| 3 | Belanja Pegawai |  |  |
| 4 | Belanja Barang dan Jasa |  |  |
| 5 | - Belanja Persediaan |  |  |
| 6 | - Belanja Jasa |  |  |
| 7 | - Belanja Pemeliharaan |  |  |
| 8 | - Belanja Perjalanan Dinas |  |  |
| 9 | - Belanja Lainnya |  |  |
| 10 | Jumlah Belanja Barang dan Jasa (5 s/d 9) |  |  |
| 11 | Belanja Modal |  |  |
| 12 | Jumlah Pengeluaran (3+10+11) |  |  |
| 13 | Sisa Dana BOS tahun berjalan (1(12) |  |  |
| 14 | Saldo Dana BOS Tahun Lalu |  |  |
| 15 | Pendapatan bunga bank |  |  |
| 16 | Biaya admin bank |  |  |
| 17 | Saldo Kas Lainnya per 31 Des. (13+14+15+16) |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember2020**  **(Rp)** |
| Piutang Pajak | **........................** |  | **........................** |

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut.

|  | 31 Des. 2021 |  | 31 Des. 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| (Rp) | (Rp) |
| Piutang pajak reklame |  |  |  |
| Piutang pajak mineral bukan logam |  |  |  |
| Piutang pajak restoran |  |  |  |
| Piutang pajak hiburan |  |  |  |
| Piutang pajak air tanah |  |  |  |
| Piutang PBB P2 |  |  |  |
| Piutang pajak penerangan jalan |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |

#### Piutang Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (*Official Asessment*).Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebesar Rpxxxxxx terinci sebagai berikut:

**Tabel1Perkembangan Piutang Pajak Reklame**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun SKP** | **Saldo**  **31 Des 2020** | **Penambahan Piutang** | **Pengurangan Piutang** | **Saldo**  **31 Des 2021** |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| **Jumlah** |  |  |  |  |

Penambahan sebesar Rpxxxxxxxmerupakan jumlah Surat Ketetapan Pajak Reklame yang diterbitkan tahun anggaran 2021. Pengurangan sebesar RpxxxxxxmerupakanPenerimaan piutang di tahun 2021 meliputi piutang periode sebelumnya sebesar Rpxxxxxxx dan piutang tahun 2021 sebesar Rpxxxxxxx

Penyisihan piutang pajak reklame tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

**Tabel1Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2021**

| **Kualitas Piutang** | **Umur**  **Piutang Pajak** | **Jumlah (Rp)** | **% Penyisihan** | **Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lancar | < 1 tahun |  |  |  |
| Kurang Lancar | 1 – 2 tahun |  |  |  |
| Diragukan | >2 – 5 Tahun |  |  |  |
| Macet | > 5 Tahun |  |  |  |
| **Jumlah** |  |  |  |  |

#### 

#### Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem *Self Asessment*. Saldo piutang pajak mineral bukan logam per 31 Desember 2021 sebesar Rpxxxxx. Jumlah tersebut merupakan piutang tahun xxxx dan xxxxx yang belum tertagih sampai dengan tahun 2021.

**Tabel1.Perkembangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun SKP** | **Saldo**  **31 Des2020** | **Penambahan Piutang** | **Pelunasan Piutang** | **Saldo**  **31 Des 2021** |
|  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| **Jumlah** | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

**Tabel1.Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kualitas Piutang** | **Umur**  **Piutang Pajak** | **Jumlah**  **(Rp)** | **% Penyisihan** | **Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021** |
| Lancar | < 1 tahun |  |  |  |
| Kurang Lancar | 1 – 2 tahun |  |  |  |
| Diragukan | >2 – 5 Tahun |  |  |  |
| Macet | > 5 Tahun |  |  |  |
| **Jumlah** |  |  |  |  |

#### Piutang Pajak Restoran

Pajak restoran pemungutannya menggunakan sistem *Self Asessment*. Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2021 sebesar Rpxxxxxxx terinci sebagai berikut:

**Tabel1.Perkembangan Piutang Pajak Restoran**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun SKP** | **Saldo**  **31 Des2020** | **Penambahan Piutang** | **Pelunasan Piutang** | **Saldo**  **31 Des 2021** |
|  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| **Jumlah** | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Penyisihan piutang pajak restoran tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

**Tabel1.Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kualitas Piutang** | **Umur**  **Piutang Pajak** | **Jumlah** | **% Penyisihan** | **Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021** |
| Lancar | < 1 tahun |  |  |  |
| Kurang Lancar | 1 – 2 tahun |  |  |  |
| Diragukan | >2 – 5 Tahun |  |  |  |
| Macet | > 5 Tahun |  |  |  |
| **Jumlah** |  |  |  |  |

#### 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Piutang Retribusi | **........................** |  | **........................** |

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020sebesar Rpxxxxxxx dan Rpxxxxxxx terinci sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31 Des 2021 |  | 31 Des 2020 |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan |  |  |  |
| Piutang Retribusi Pelayanan Pasar |  |  |  |
| Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah |  |  |  |
| Piutang Retribusi Terminal |  |  |  |
| Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) |  |  |  |
| Piutang Retribusi IMB |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |

#### 

#### Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp.xxxxxxxxx, terinci sebagai berikut:

**Tabel1.Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Retribusi Pelayanan Kesehatan** | **31 Des 2020** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **31 Des 2021** |
| 1 | Laboratorium Kesehatan |  |  |  |  |
| 2 | Sewa tanah puskesmas untuk ATM (Dinkes) |  |  |  |  |
| 3 | Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian |  |  |  |  |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi(BPJS Puskesmas |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |  |  |

Penambahan sebesar Rpxxxxxx meliputi:

* Sebesar Rp.xxxxx merupakan jasa pelayanan kesehatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021,
* Pelayanan kesehatan non kapitasi BPJS diPuskesmas sebesar Rpxxxxxx yang belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi.

Sedangkan pengurangan sebesar Rpxxxxxxxmeliputi:

* Klaim kepada PT. Askes/BPJS yang telah mendapatkan persetujuan pada bulan Oktober 2020 dan telah di terima tahun 2021,
* Pendapatan sewa tanah puskesmas untuk ATM yang telah diterima sebesar Rpxxxxx,

Penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

**Tabel2Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2021**

| **No** | **Jenis Piutang** | **Saldo**  **31 Des 2021** | **Kualitas Piutang** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lancar**  **(0,5%)** | **Kurang Lancar (10%)** | **Diragukan**  **(50%)** | **Macet**  **(100%)** |
| 1 | Piutang Pelayanan Kesehatan |  |  |  |  |  |
|  | Penyisihan Piutang |  |  |  |  |  |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi(BPJS Puskesmas |  |  |  |  |  |
|  | Penyisihan piutang |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah Piutang (1) + (2)** |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah Penyisihan Piutang (1) + (2)** |  |  |  |  |  |

#### Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2021 sebesar Rpxxxxxx terinci sebagai berikut.

**Tabel 1Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021**

| **No** | **Uraian** | **Saldo 31 Des2020** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo 31 Des 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | **Retribusi Pasar Umum** |  |  |  |  |
| 1 | Pasar Baru Lumajang |  |  |  |  |
| 2 | Pasar Plaza |  |  |  |  |
| 3 | Pasar Serangin |  |  |  |  |
| 7 | Dst ..... |  |  |  |  |
|  | **Jumlah (1)** |  |  |  |  |
| II | **Ret. Daftar Ulang** |  |  |  |  |
| 1 | Baru Lumajang |  |  |  |  |
| 2 | Plaza Lumajang |  |  |  |  |
| 4 | Dst .... |  |  |  |  |
|  | **Jumlah (2)** |  |  |  |  |
| III | **Ret. Perijinan Pasar** |  |  |  |  |
| 1 | H. Jogotrunan |  |  |  |  |
| 2 | Serangin |  |  |  |  |
| 3 | Pasirian |  |  |  |  |
| 4 | Dst .... |  |  |  |  |
|  | **Jumlah (3)** |  |  |  |  |
|  | **Jumlah (1+2+3)** |  |  |  |  |

Penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

**Tabel 2Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kualitas Piutang** | **Umur**  **Piutang Retribusi** | **Jumlah** | **% Penyisihan** | **Penyisihan Piutang per 31 Des 2021** |
| Lancar | < 1 bulan |  |  |  |
| Kurang Lancar | < 1 – 3 bulan |  |  |  |
| Diragukan | >3 – 12 bulan |  |  |  |
| Macet | > 12 bulan |  |  |  |
| **Jumlah** |  |  |  |  |

***Dan seterusnya .......***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7)**Penyisihan Piutang Tak Tertagih | **(........................)** |  | **(........................)** |

Berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2021, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rpxxxxxxx) dan sebesar (Rp.xxxxxxxxxx) 2020, untuk setiap jenis piutang.

Tabel 1 : Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2020

| **Penyisihan Piutang** | **Saldo Akhir 31 Des 2020** | **Koreksi tahun Berjalan** | **Mutasi**  **Bertambah (Berkurang)** | **Saldo Akhir**  **31 Des 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PENYISIHAN PIUTANG PAJAK** |  |  |  |  |
| Penyisihan Piutang Pajak |  |  |  |  |
| Penyisihan Piutang Retribusi |  |  |  |  |
| Penyisihan Piutang lainnya |  |  |  |  |
| Dst.... |  |  |  |  |
| **JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIIH (1+2+3)** |  |  |  |  |

Koreksi tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut. (Contoh)

* Sebesar Rpxxxxx merupakan kurang catat penyisihan piutang pajak tahun 2020 atau sebesar 0,5% dari jumlah piutang pajak penerangan jalan tahun 2020 yang belum di catat yaitu sebesar Rpxxxxx.

Mutasi bertambah (berkurang) sebesar Rpxxxxx merupakan beban penyisihan piutang tahun 2021 (lihat Laporan Operasional).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| **8)**Persediaan | **2.062.940** |  | **1.326.000** |

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil*stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

**Tabel1 :Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021**

| **No** | **Uraian** | **Jumlah** | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persediaan per 31 Desember 2021 |  | - |
| 2 | Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal |  | - |
| 3 | Saldo persediaan setelah koreksi |  | 2.062.940 |
| **4** | **Ditambah :** |  |  |
| 5 | Belanja Persediaan LRA 2021 |  |  |
| 6 | Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja) |  |  |
| 7 | Belanja Persediaan BOS |  |  |
| 8 | Penerimaan hibah persediaan |  |  |
| 9 | Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8) |  |  |
| **10** | **Dikurangi :** |  |  |
| 11 | Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019 |  |  |
| 12 | Pengeluaran hibah persediaan |  |  |
| 13 | Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12) |  |  |
| 14 | Jumlah persediaan yang siap digunakan |  |  |
| 15 | Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional) |  |  |
| 16 | Persediaan tahun 2021 |  | 2.062.940 |

**Tabel2.Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Persediaan** | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persediaan Alat Tulis Kantor | 2.062.940 | 1.326.000 |
| 2 | Persediaan Barang cetakan | - | - |
| 3 | Persediaan Material/Bahan | - | - |
| 4 | Persediaan Bahan Baku Bangunan | - | - |
| 5 | Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas | - | - |
| 6 | Persediaan Bahan/Bibit Tanaman | - | - |
| 7 | Persediaan Obat-obatan | - | - |
| 8 | Persediaan Bahan Kimia | - | - |
| 9 | Persediaan bahan praktek kegiatan | - | - |
| 10 | Persediaan alat kesehatan/ kedokteran | - | - |
| 11 | Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat(obatan | - | - |
| 12 | **Persediaan Banda Pos** | - | - |
| 13 | Persediaan Perangko | - | - |
| 14 | **Persediaan Bahan Makanan Pokok** | - | - |
| 15 | Persediaan Bahan Makanan Pokok | - | - |
| 16 | Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih | - | - |
| 17 | Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering) | - | - |
| 18 | Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya | - | - |
| 19 | Persediaan pupuk dan pembasmi hama | - | - |
| 20 | Bahan Pakai Habis Lainnya | - | - |
| 21 | Alat Peraga dan Mainan | - | - |
| 22 | Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga | - | - |
|  | **Jumlah** | 2.062.940 | 1.326.000 |

### ASET TETAP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Aset Tetap | **2.411.182.877** |  | **2.396.286.787** |

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

* Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
* Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
* Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
* Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
* Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

**Tabel1Daftar Mutasi Aset Tetapper 31 Desember 2020 dan 2019**

| **No** | **Uraian** | **Saldo Awal** | **Koreksi** | **Mutasi** | | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2020** | **Bertambah** | **Berkurang** | **31 Des 2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Tanah | 1.165.068.000 |  |  |  | 1.165.068.000 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 346.110.280 |  | 14.896.090 |  | 361.006.370 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 885.108.507 |  | - |  | 885.108.507 |
| 4 | Jalan, Irigrasi, dan Jaringan |  |  |  |  |  |
| 5 | Aset Tetap Lainnya |  |  |  |  |  |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **2.396.286.787** |  | **14.896.090** |  | **2.411.182.877** |

Rincian koreksi aset tetap sebagai berikut:

* Koreksi kurang catat Rp -,
* Koreksi lebih catat Rp -,

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021sebagai berikut.

1. Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp14.896.090 meliputi:
2. Realisasi belanja modal peralatan dam mesin Aset Tetap sebesar Rp14.896.090
3. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan aset tetap KDP Rp-,
4. Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp -,
5. Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp -,
6. Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp -,
7. Utang Belanja Modal Peralatan Rp -,
8. Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp -,
9. Mutasi masuk (*transfer in*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp -,
10. Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp -, meliputi:
11. Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp -,
12. Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp -,
13. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp -,
14. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp -,dan
15. Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp -,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020(Rp)** |
| Tanah | **1.165.068.000** |  | **1.165.068.000** |

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020masing-masing sebesar Rp 1.165.068.000 dan Rp1.165.068.000, terinci sebagai berikut:

**Tabel DaftarMutasiAset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019**

| **No** | **Uraian** | **Saldo Awal** | **Koreksi** | **Mutasi** | | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2020** | **Bertambah** | **Berkurang** | **31 Des 2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Tanah A | 1.165.068.000 |  |  |  | 1.165.068.000 |
| 2 | Tanah B |  |  |  |  |  |
| 3 | Tanah C |  |  |  |  |  |
| 4 | dsb |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **1.165.068.000** |  |  |  | **1.165.068.000** |

Pada Tahun 2021 tidak ada Mutasi Penambahan atau Pengurangan Aset Tanah pada Kelurahan Jogotrunan sehingga Jumlah Nilai Aset Tanah Kelurahan Jogotrunan pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 sama yaitu sebesar Rp 1.165.068.000,-.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Peralatan dan Mesin | **361.006.370** |  | **346.110.280** |

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp361.006.370 dan Rp346.110.280, terinci sebagai berikut:

**Tabel DaftarMutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesinper 31 Desember 2021 dan 2020**

| **No** | **Peralatan dan mesin** | **Saldo Awal** | **Koreksi** | **Mutasi** | | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2020** | **Bertambah** | **Berkurang** | **31 Des 2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Alat-alat besar | 7.000.000 |  |  |  | 7.000.000 |
| 2 | Alat-alat Angkutan | 48.189.000 |  |  |  | 48.189.000 |
| 3 | Alat-alat bengkel dan Alat Ukur |  |  |  |  |  |
| 4 | Alat-alat Pertanian |  |  |  |  |  |
| 5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 281.030.280 |  | 13.906.090 |  | 281.030.280 |
| 6 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | 8.225.000 |  |  |  | 8.225.000 |
| 7 | Alat-alat Kedokteran | 666.000 |  |  |  | 666.000 |
| 8 | Alat-alat Laboratorium | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |
| 9 | Alat-alat Pertanian |  |  | 990.000 |  |  |
|  | **Jumlah** | **346.110.280** |  | **14.896.090** |  | **361.006.370** |

Pada Tahun 2021 terdapat Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 14.896.090,- yang terdiri dari :

* Penambahan Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 14.896.090,- merupakan hasil realisasi atas Belanja Belanja Modal 2 alat kantor dan rumah tangga, 1 alat pertanian.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Gedung dan Bangunan | **885.108.507** |  | **885.108.507** |

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**TabelDaftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

**Per 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

| **No** | **Gedung dan Bangunan** | **Saldo Awal** | **Koreksi** | **Mutasi** | | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2020** | **Bertambah** | **Berkurang** | **31 Des 2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Bangunan Gedung | 869.398.507 |  |  |  | 869.398.507 |
| 2 | Monumen | 15.710.000 |  |  |  | 15.710.000 |
|  | **Jumlah** | **885.108.507** |  |  |  | **885.108.507** |

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

* Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp,-
* Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. Rp,-

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp.,- meliputi:

* Penambahan dari belanja modal bangunan gedung sebesar Rp,-
* Penambahan dari belanja modal monumenRp,-
* Penambahan dari belanja barang Rp,-

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp,-sebagai berikut:

* Pengurangan karena penghapusan Rp,-
* Pengurangan karena dihibahkan Rp,-
* Pengurangan karena Rp,-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Jalan, Irigasi & Jaringan | **........................** |  | **........................** |

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang di kelola oleh Kelurahan Jogotrunan terinci pada tabel berikut ini:

**TabelDaftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan JaringanMilik Pemerintah Kabupaten Lumajangper 31 Desember 2021**

| **No** | **Jenis** | **Saldo**  **31 Desember**  **2020** | **Koreksi** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo**  **31 Des 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jalan |  |  |  |  |  |
| 2 | Jembatan |  |  |  |  |  |
| 3 | Bangunan Air/Irigasi |  |  |  |  |  |
| 4 | Instalasi |  |  |  |  |  |
| 5 | Jaringan |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |  |  |  |

Koreksi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

* Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena kurang catat sebesar Rp,-
* Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena lebih catat sebesar Rp,-

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp,-meliputi :

* Penambahan dari belanja modal sebesar Rp,-
* Penambahan dari hibah Rp,-
* Penambahan dari belanja barang Rp,-

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp,-sebagai berikut :

* Pengurangan karena penghapusan Rp,-
* Pengurangan karena Rp,-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Aset Tetap Lainnya | **........................** |  | **........................** |

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp,- dan Rp,-Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

**TabelDaftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis** | **31 Des 2020** | **Koreksi** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **31 Des 2021** |
| 1 | Buku dan Pepustakaan |  |  |  |  |  |
| 2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan |  |  |  |  |  |
| 3 | Hewan Ternak dan Tanaman |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |  |  |  |

Perubahan saldoAset Tetap Lainnya selama tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp,-berasal dari:

1. Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari APBD tahun 2021sebesar Rp,- dengan rincian sebagai berikut.
2. Hibah buku berasal dari ..sebesar Rp,-
3. Dll

Sedangkan pengurangan aset tetap lainnya merupakan penghapusan dengan SK Bupati No. ..... tahun......, terinci sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Konstruksi DalamPengerjaan | **........................** |  | **........................** |

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020masing-masing sebesar Rp,- dan Rp,-Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut:

**Tabel 1 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis** | **31 Des 2020** | **Koreksi** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **31 Des 2021** |
| *1* |  |  |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |  |  |
| *3* |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Jumlah*** |  |  |  |  |  |

### ASET LAINNYA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Aset Lainnya | **8.545.000** |  | **8.545.000** |

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 8.545.000 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.545.000 terinci sebagai berikut:

**Tabel.Daftar Rincian Aset lainnyaper 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

| **No** | **Jenis** | **31 Desember 2020** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **31 Desember 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuntutan Ganti Rugi |  |  |  |  |
| 2 | Aset Tak Berwujud |  |  |  |  |
| 3 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud |  |  |  |  |
| 4 | Aset Lain lain | 8.545.000 |  |  | 8.545.000 |
|  | **Jumlah** | 8.545.000 |  |  | 8.545.000 |

Pada Tahun 2021 tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah asset lainnnya sehingga jumlahnya sama dengan pada tahun 2020

### KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

KewajibanKelurahan Jogotrunan per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp 973.390 dan Rp 759.660 diuraikan sebagai berikut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Kewajiban Jangka Pendek | **557.135** |  | **973.390** |

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi.Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja.Saldo kewajibanjangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020masing-masing sebesar Rp 557.135

danRp 973.390Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang belanja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| 1. **Utang PFK** | **26.277.125** |  | **25.180.600** |

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan(potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 utang PFK masing-masing sebesar Rp 35.594.093 dan Rp. 26.277.125 terinci sebagai berikut.

**Tabel Daftar Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

| **No** | **Jenis** | **31 Desember 2020** | **Pungutan** | **Penyetoran** | **31 Desember 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPh ps21 | 7.517.670 | 11.691.572 | 11.691.572 | 11.691.572 |
| 2 | PPh. Ps. 22 | 1.778.401 | 1.540.023 | 1.540.023 | 1.540.023 |
| 3 | PPN | 5.373.794 | 10.266.818 | 10.266.818 | 10.266.818 |
| 4 | PPh 23 | 11.607.260 | 12.095.680 | 12.095.680 | 12.095.680 |
|  | **Jumlah** | 26.277.125 | 35.594.093 | 35.594.093 | 35.594.093 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| 1. **Pendapatan Diterima Dimuka** | **........................** |  | **........................** |

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah.Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akanmelaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2021 dan 2020 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rpxxxx dan Rpxxxxx yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM, Pendapatan Parkir Berlangganan, Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

**Tabel Daftar Rincian Pendapatan diterima dimukaper 31 Desember 2021**

| **No** | **Jenis** | **31 Desember 2020** | **Penambahan** | **pengurangan** | **31 Desember 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pendapatan Sewa |  |  |  |  |
| 2 | Parkir berlangganan |  |  |  |  |
| 3 | dll |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| 1. **Utang Lain-lain** | **........................** |  | **........................** |

Utang lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, meliputi:

* + Utang bagi hasil Pajak Daerah ke desa sebesar Rpxxxxx, merupakan bagi hasil pajak daerah tahun 2021 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan.
  + Utang bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rpxxxx0 merupakan bagi hasil retribusi daerah ke desa tahun 2021 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan;
  + Utang Dana Desa sebesar Rpxxxxx, merupakan Dana Desa tahun 2021 yang belum disalurkan ke Desa. Total penerimaan Dana Desa tahun 2021 sebesar Rpxxxxxxx dan jumlah yang sudah disalurkan sebesar Rpxxxxxxxx

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| 1. **Utang Belanja** | **557.135** |  | **973.390** |

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021tercatat sebesar Rp557.135 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp,-, utang belanja jasa Rp557.135, dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rpxxxxxxx, sebagaimana tabel dibawah.

**TabelRincian Utang Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Utang** | **31 Des 2020** | **Penambahan 2021** | **Pengurangan 2021** | **31 Des 2021** |
| 1 | Utang Belanja pegawai |  | - | - |  |
| 2 | Utang Belanja Jasa | 973.390 | - | - | 557.135 |
| 3 | Utang Belanja Pemeliharaan |  | - | - |  |
| 4 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  | - | - |  |
| 5 | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  | - | - |  |
|  | **Jumlah** | **973.390** | **-** | **-** | **557.135** |

**Utang Belanja Pegawai**

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rpxxxxxmerupakan kewajiban atas jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga medis dan non medis PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi serta kekurangan uang makanan dan minuman PNS yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2020.

**Tabel 1Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Utang** | **31 Des 2020** | **Penambahan 2021** | **Pengurangan 2021** | **31 Des 2021** |
| 1 | Utang Jasa layanan Kesehatan |  |  |  |  |
| 2 | Utang Uang Makan |  |  |  |  |
| 3 | dll |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |  |  |

**Utang Belanja Jasa**

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp 557.135 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

**Tabel Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Utang** | **31 Des 2020** | **Penambahan 2021** | **Pengurangan 2021** | **31 Des 2021** |
| 1 | Jasa surat kabar | 225.000 | - | - | - |
| 2 | Jasa internet | 410.000 | - | - | 409.500 |
| 3 | PDAM | 270.600 | - | - | 19.900 |
| 4 | Jasa telepon | 67.790 | - | - | 127.735 |
|  | **Jumlah** | 973.390 | **-** | **-** | 557.135 |

### EKUITAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Ekuitas | **1.818.671.160,21** |  | **1.857.181.557,65** |

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

**Tabel1 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Akun** | **31 Desember 2021** | **31 Desember 2020** |
| 1 | Jumlah Aset | 1.819.228.295,21 | 1.858.154.947,65 |
| 2 | Jumlah Kewajiban | 557.135 | 973.390 |
| 3 | Ekuitas | 1.818.671.160,21 | 1.857.181.557,65 |

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

**Tabel 1.Daftar Rincian Ekuitas Keluarahan Jogotrunan**

**per 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2021** | **2020** |
|
| 1 | Ekuitas Awal | 1.857.181.557,65 | 1.680.066.007,59 |
| 2 | Surplus (Defisit) LO | (1.048.493.125,44) | (881.825.361,94) |
| 3 | Dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi / kesalahan mendasar | - | - |
| 4 | EKUITAS AKHIR | 1.818.671.160,21 | 1.857.181.557,65 |

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

## 3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1. **Pendapatan LO**

### Pendapatan Asli Daerah– LO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| Pendapatan Pajak Daerah LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan pajak LO yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020, terinci sebagai berikut:

**Tabel 2.Daftar Pendapatan Pajak Daerah LOPer 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Akun** | **Pendapatan Pajak LRA** | **Pajak 2021Belum Diterima** | **Penerimaan Piutang Tahun Lalu** | **Pendapatan Pajak LO** | **Pendapatan Pajak LO** |
| 1 | Pajak Hotel |  |  |  |  |  |
| 2 | Pajak Restoran |  |  |  |  |  |
| 3 | Pajak Hiburan |  |  |  |  |  |
| 4 | Pajak Reklame |  |  |  |  |  |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan |  |  |  |  |  |
| 6 | Pajak Parkir |  |  |  |  |  |
| 7 | Pajak Air Tanah |  |  |  |  |  |
| 8 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |  |  |  |  |  |
| 9 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan |  |  |  |  |  |
| 10 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan |  |  |  |  |  |
| **Jumlah Pendapatan Pajak** | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember**  **2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| Pendapatan Retribusi Daerah LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.Daftar Pendapatan Retribusi Daerah – LOper 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Nama Akun** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Retribusi Jasa Umum-LO** |  |  |
|  | Retribusi pelayanan kesehatan-LO |  |  |
|  | Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan-LO |  |  |
|  | Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO |  |  |
|  | Retribusi pelayanan pasar-LO |  |  |
|  | Retribusi pengujian kendaraan bermotor-LO |  |  |
|  | Retribusi pengendalian menara telekomunikasi-LO |  |  |
|  | Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang |  |  |
| **2** | **Retribusi Jasa Usaha-LO** |  |  |
|  | Retribusi pemakaian kekayaan daerah-LO |  |  |
|  | Retribusi terminal-LO |  |  |
|  | Retribusi tempat khusus parkir-LO |  |  |
|  | Retribusi rumah potong hewan-LO |  |  |
|  | Retribusi tempat rekreasi dan olahraga-LO |  |  |
|  | Retribusi sewa gedung ruangan aula |  |  |
| **3** | **Retribusi Perijinan Tertentu-LO** |  |  |
|  | Retribusi ijin mendirikan bangunan-LO |  |  |
|  | Retribusi ijin gangguan/keramaian-LO |  |  |
|  | Retribusi ijin trayek-LO |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 (Dinas Kesehatan), terincian sebagai berikut.

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LRA | **........................** |
| Dikurangi : |  |
| Penerimaan klaim dana JKN Non Kapitasi kepada BPJS tahun 2019 yang diterima di tahun 2021 (penerimaan piutang) | (**........................**) |
| Ditambah : |  |
| Klaim Dana JKN Non Kapitasi kepada BPJS tahun 2020 yang sudah mendapatkan umpan balik tetapi s/d 31 Desember 2021 belum diterima | **........................** |
| Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO | **........................** |

Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan LO sebagaimana tabel 196 berikut.

**Tabel 4.Daftar Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO**

**Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **SKPD** | **Retribusi Pelayanan Kesehatan(LRA**  **31-12-2021** | **Retribusi Pelayanan Kesehatan 2021**  **Belum Diterima** | **Penerimaan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan** | **Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO**  **31-12-2020** | **Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO**  **31-12-2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3+4-5 | 7 |
| 1 | DINAS KESEHATAN |  |  |  |  |  |
| 2 | PUSK. TEMPURSARI |  |  |  |  |  |
| 3 | PUSK. PRONOJIWO |  |  |  |  |  |
| 4 | PUSK. CANDIPURO |  |  |  |  |  |
| 5 | PUSK. PENANGGAL |  |  |  |  |  |
| 6 | PUSK. PASIRIAN |  |  |  |  |  |
| 7 | PUSK. BADES |  |  |  |  |  |
| 8 | PUSK. TEMPEH |  |  |  |  |  |
| 9 | PUSK. GESANG |  |  |  |  |  |
| 10 | PUSK. ROGOTRUNAN |  |  |  |  |  |
|  | **JUMLAH** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Pelayanan Persampahan LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dinas Lingkungan Hidup) masing-masing sebesar Rpxxx dan Rpxxx. Pada akhir periode tidak ada hak atas pendapatan retribusi pelayanan persampahan yang belum diterima atau diterima di muka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Parkir di tepi jalan umum LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 (Dinas Perhubungan), terinci sebagai berikut.

**Tabel 5.Retribusi Parkir Di Tepi Jalan UmumPer 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2021** | **2020** |
| Jumlah pendapatan retribusi Parkir di tepi jalan umum LRA |  |  |
| Dikurangi : |  |  |
| Retribusi Parkir di tepi jalan umum berlangganan tahun berjalan yang belum menjadi hak (diterima di muka) |  |  |
| Ditambah : |  |  |
| Saldo awal Pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum berlangganan diterima di muka yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun berjalan |  |  |
| Pendapatan Retribusi Parkir di tepi jalan umum LO |  |  |

**Tabel 6.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan Diterima di Mukaper 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Pendapatan Parkir Berlangganan LRA** | | | **Pendapatan Parkir Berlangganan Diterima Di Muka 2021** | | **Pendapatan Parkir Berlangganan Diterima Di Muka 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan Penerimaan** | **Realisasi 2021** | **Periode (bulan)** | **Periode (bulan)** | **Jumlah** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Januari |  |  |  |  |  |
| 2 | Pebruari |  |  |  |  |  |
| 3 | Maret |  |  |  |  |  |
| 4 | April |  |  |  |  |  |
| 5 | Mei |  |  |  |  |  |
| 6 | Juni |  |  |  |  |  |
| 7 | Juli |  |  |  |  |  |
| 8 | Agustus |  |  |  |  |  |
| 9 | September |  |  |  |  |  |
| 10 | Oktober |  |  |  |  |  |
| 11 | Nopember |  |  |  |  |  |
| 12 | Desember |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Pelayanan Pasar LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi pelayanan Pasar LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 (Dinas Pasar), sebagai berikut.

**Tabel 7.Rincian Retribusi Pelayanan Pasar LOTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2021** | **2020** |
| Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LRA |  |  |
| Ditambah : |  |  |
| 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2020 yang belum diterima |  |  |
| Dikurangi : Penerimaan yang bukan pendapatan LO |  |  |
| 1. Penerimaan Piutang Tahun lalu di tahun 2020 | (………………….) | (………………….) |
| 2. Pendapatan 2019 diterima di muka | (…………………..) |  |
| **Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar – LO** | **........................** | **........................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Pengujian KendaraanBermotor LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO yang telah diterima dan menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 (Dinas Perhubungan) masing-masing Rpxxx dan Rpxxx. Pada akhir tahun 2020 tidak ada pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor di terima di muka atau yang masih harus diterima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi LO | **........................** |  | **........................** |

Realisasi Retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rpxxx. Dan Rp0,00. Retribusi tersebut merupakan jenis retribusi baru yang di pungut oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang sejak tahun 2020.Retribusi pengendalian menara diatur di dalam Perda Kabupaten Lumajang Nomor 01 tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang LO | **........................** |  | **........................** |

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2020 dan 2019masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp0,00. Retribusi tersebut merupakan jenis retribusi baru yang di pungut oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sejak tahun 2020 yang merupakan pelimpahan kewenangan jenis retribusi dari Pemerintah Propinsi.

Rincian retribusi pelayanan tera/tera ulang:

Pendapatan retribusi tera/tera ulang LRA .............................. Rp**........................**

Pendapatan retribusi tera/tera ulang diterima dimuka............. Rp**........................**

Pendapatan retribusi tera/tera ulang LO .................................Rp 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Pemakaian KekayaanDaerah LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

**Tabel 8.Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 dan2020**

*dalam rupiah*

| **NO** | **SKPD** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Kesehatan |  |  |
| 2 | Puskesmas Tempursari |  |  |
| 3 | Puskesmas Pronojiwo |  |  |
| 4 | Puskesmas Candipuro |  |  |
| 5 | Puskesmas Penanggal |  |  |
| 6 | Puskesmas Pasirian |  |  |
| 7 | Puskesmas Bades |  |  |
| 8 | Puskesmas Tempeh |  |  |
| 9 | Puskesmas Rogotrunan |  |  |
| 10 | Puskesmas Labruk Kidul |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |

**Tabel 9.Perhitungan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah LRA dan LO**

*dalam rupiah*

| **No** | **SKPD** | **Pendapatan LRA** | **Ditambah** | | **Dikurangi** | | **Pendapatan LO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendapata Diterima Dimuka 2020** | **Pendapatan 2021**  **Belum Diterima** | **Pendapatan Diterima di muka 2021** | **Penerimaan Piutang** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+4+5(6(7 |
| 1 | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Puskesmas Tempursari |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Puskesmas Pronojiwo |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Puskesmas Candipuro |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Puskesmas Penanggal |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Puskesmas Pasirian |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Puskesmas Bades |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Puskesmas Tempeh |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Puskesmas Rogotrunan |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Puskesmas Labruk Kidul |  |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Terminal LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi terminal LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per31 Desember 2021 dan 2020 (Dinas Perhubungan), sebagai berikut.

**Tabel 10.Perhitungan Retribusi Terminal LRA dan LOTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **2021** | **2020** |
| Pendapatan Retribusi Terminal LRA |  |  |
| Dikurangi : |  |  |
| Penerimaan piutang tahun lalu |  |  |
| Ditambah : |  |  |
| Surat Ketetapan retribusi terminal yang belum terealisasi (piutang) |  |  |
| **Pendapatan Retribusi Terminal LO** |  |  |

Pada akhir tahun 2021 dan 2020 tidak ada retribusi terminal diterima dimuka atau yang belum diterima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 (Dinas Perhubungan) seluruhnya telah diterima, sehingga tidak ada retribusi tempat khusus parkir yang kurang/lebih bayar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi rumah potong hewan LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan sudah diterima sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 (Dinas Pertanian), masing masing sebesar Rpxxx dan Rpxxx terdiri dari:

**Tabel 11.Perhitungan Retribusi Rumah Potong Hewan LRA dan LOTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis** | **2021** | **2020** |
| I | Ex. Kantor Peternakan |  |  |
| 1 | Sapi Usaha |  |  |
| 2 | Kambing |  |  |
| II | Dinas Pertanian |  |  |
| 1 | Sapi Usaha |  |  |
| 2 | Kambing |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |

Pada akhir tahun 2021 dan 2020 tidak ada retribusi rumah potong hewan yang diterima dimuka atau yang belum diterima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi tempat rekreasi danOlahraga LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:

**Tabel 12.Daftar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Ragaper 31 Desember 20120 dan 2019**

*dalam rupiah*

| **No.** | **Uraian** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemandian alam Selokambang (Disbudpar) |  |  |
| 2 | Kawasan Wonorejo Terpadu/KWT (Disbudpar) |  |  |
| 3 | Segitiga Ranu (Disbudpar) |  |  |
| 4 | Pantai bambang (Disbudpar) |  |  |
| 5 | Pantai Wot Galih (Disbudpar) |  |  |
| 6 | Pantai Tempursari (Disbudpar) |  |  |
| 7 | Goa Tetes (Disbudpar) |  |  |
| 8 | B29 |  |  |
| 9 | Kolam Renang Veteran (Kanpora) |  |  |
| 10 | Stadion Semeru (Kanpora) |  |  |
| 11 | Sewa GOR Wira Bakti (Kanpora) |  |  |
| 12 | Sewa Gedung/Aula/Ruangan (Bagian Umum) |  |  |
| 13 | Sewa Lapangan Tennis (Kanpora) |  |  |
| 14 | Sewa tanah ATM dan tanah selokambang (Disbudpar) |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |

Pada akhir tahun 2021 dan 2020 tidak ada retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang diterima dimuka atau yang belum diterima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Ijin MendirikanBangunan (IMB)- LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rpxxx dan Rpxxx.

**Tabel 13.Daftar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan LOPer 31 Desember 2021dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **2021** | **2020** |
| **Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan – LRA** |  |  |
| Ditambah : SKRD tahun berjalan yang belum diterima |  |  |
| Dikurangi : |  |  |
| Penerimaan Piutang Tahun Lalu |  |  |
| **Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan – LO** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Ijin Gangguan LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi ijin gangguan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rpxxx dan Rpxxx dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel14.Daftar Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian LOPer 31 Desember 2021dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **2021** | **2020** |
| **Retribusi Ijin Gangguan – LRA** |  |  |
| Ditambah : SKRD tahun berjalan yang belum diterima |  |  |
| Dikurangi : |  |  |
| Penerimaan Piutang Tahun Lalu |  |  |
| **Retribusi Ijin Gangguan – LO** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Retribusi Ijin Trayek LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan retribusi ijin trayek LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per31 Desember 2020 dan 2019(Dinas Perhubungan) masing-masing sebesar Rpxxx dan Rpxxx. Sampai dengan akhir tahun 2020 dan 2019 tidak ada pendapatan ijin trayek yang belum di terima atau diterima di muka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Pendapatan HasilPengelolaan KekayaanDaerah Yang Dipisahkan | **........................** |  | **........................** |

Jumlah tersebut merupakan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

**Tabel15.Daftar Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LOper 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Keterangan** | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penerimaan dividen dari PT. Bank Jatim, Tbk. |  |  |
| 2 | Penerimaan dividen dari PT. BPR Jatim |  |  |
|  | **Jumlah Pendapatan LRA** |  |  |
| 3 | Laba (Rugi) PD. BPR Bank Pasar Tahun 2020 dan 2019 (kepemilikan 100%) |  |  |
| 4 | Laba (rugi) PD. Semeru Tahun 2020 dan 2019 (kepemilikan 100%) |  |  |
| 5 | Laba (rugi) PDAM Tahun 2020 dan 2019 (kepemilikan 100%) |  |  |
|  | **Jumlah Pendapatan LO** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Pendapatan Asli DaerahLainnya – LO | **........................** |  | **........................** |

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang menjadi hak Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut.

**Tabel 16.Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LOPer 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Nama Akun** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO** |  |  |
|  | Penjualan drum bekas |  |  |
|  | Penjualan hasil penebangan pohon |  |  |
|  | Penjualan hasil pertanian |  |  |
|  | Penjualan hasil perkebunan |  |  |
|  | Penjualan hasil perikanan |  |  |
| **2** | **Penerimaan Jasa Giro** |  |  |
|  | Jasa giro kas daerah |  |  |
|  | Jasa giro bendahara |  |  |
|  | Jasa giro pengeluaran daerah |  |  |
|  | Jasa giro penerimaan daerah |  |  |
|  | Jasa giro rekeening dana BOS |  |  |
|  | Jasa giro rekening Dana Cadangan |  |  |
| **3** | **Pendapatan Bunga Deposito** |  |  |
|  | Rekening deposito pada Bank Jatim |  |  |
|  | Rekening deposito pada Bank Mandiri |  |  |
|  | Rekening deposito pada Bank BRI |  |  |
|  | Rekening deposito pada Bank BNI |  |  |
|  | Deposito dana cadangan |  |  |
| **4** | **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah** |  |  |
|  | Kerugian uang |  |  |
|  | Kerugian barang daerah |  |  |
| **5** | **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan** |  |  |
|  | Bidang kesehatan |  |  |
|  | Bidang pekerjaan umum |  |  |
|  | Bidang Pendidikan |  |  |
| **6** | **Pendapatan Denda Pajak** |  |  |
|  | Pendapatan Denda Pajak Hotel |  |  |
|  | Pendapatan denda pajak restoran |  |  |
|  | Pendapatan denda pajak reklame |  |  |
|  | Pendapatan denda pajak parkir |  |  |
|  | Pendapatan denda pajak air bawah tanah |  |  |
|  | Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan |  |  |
|  | Pendapatan denda pajak mineral bukan logam |  |  |
| **7** | **Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan** |  |  |
|  | Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan |  |  |
| **8** | **Pendapatan dari Pengembalian** |  |  |
|  | Penerimaan kembali belanja tahun lalu |  |  |
|  | Penerimaan pendapatan dari pengembalian belanja gaji-LO |  |  |
| **9** | **Sumbangan Pihak Ke III – LO** |  |  |
|  | Sumbangan rekanan, pengusahan lainnya |  |  |
|  | Pendapatan dari sumbangan Petani Tebu |  |  |
| **10** | **Pendapatan dari BLUD** |  |  |
|  | Pendapatan dari BLUD RSD Dr. Haryoto |  |  |
|  | Pendapatan dari BLUD Akper Pemkab Lumajang |  |  |
|  | Penerimaan Lainnya |  |  |
| **11** | **Pendapatan Sewa-LO** |  |  |
|  | Pendapatan Sewa Tanah |  |  |
|  | Pendapatan Sewa Bangunan |  |  |
| **12** | **Pendapatan dari Siaran** |  |  |
|  | Pendapatan dari siaran radio |  |  |
| **13** | **Dana Kapitasi JKN pada FKTP** |  |  |
|  | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tempursari-LO |  |  |
|  | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pronojiwo-LO |  |  |
|  | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Candipuro-LO |  |  |
|  | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Penanggal-LO |  |  |
|  | Pendapatan denda sewa rusunawa |  |  |
| **15** | **Lain-lain pendapatan** |  |  |
|  | Penerimaan Lain-lain |  |  |
| 16 | Pendapatan bunga BOS |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |

**Tabel 17.Hubungan Lain-lain PAD yang sah LRA dan LO tahun 2021**

*dalam rupiah*

| **Uraian** | **Jumlah (Rp)** | |
| --- | --- | --- |
| Lain-lain PAD yang Sah LRA |  |  |
| DITAMBAH : |  |  |
| 1. Jasa giro dana cadangan |  |  |
| 1. Deposito Dana Cadangan |  |  |
| 1. Penambahan piutang Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan (RSUD dr. Haryoto) |  |  |
| 1. Pengakuan Pendapatan BLUD atas pendapatan diterima dimuka tahun 2019 |  |  |
| 1. Pendapatan BLUD 2019 belum diterima |  |  |
| 1. Pendapatan Diterima dimuka IPP 2019 yang sudah jadi hak di tahun 2020 (Akper) |  |  |
| 1. Pendapatan tahun 2019 belum diterima (AKPER) |  |  |
| 1. Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah / tebu 2016 yang sudah jadi hak tahun 2019 (Bag. Tapem) |  |  |
| 1. Pendapatan Diterima Dimuka Atas Sewa 2 Bidang Tanah Tahun 2019 Sudah Menjadi Hak di Tahun 2020 (Dinas Pertanian) |  |  |
| **Jumlah Penambahan** |  |  |
| DIKURANGI : |  |  |
| 1. Penerimaan Piutang BLUD tahun lalu (2019) | (......................) |  |
| 1. Pendapatan LRA 2019 (BLUD) perupakan pend diterima dimuka | (.....................) |  |
| 1. Pendapatan dana BOS di reklasifikasi ke Pendapatan Hibah | (........................) |  |
| 1. Pendapatan sewa tanah 2019 diterima dimuka (BPKD) | (........................) |  |
| 1. Pendapatan sewa tanah 2020 diterima dimuka (Bag. Tapem) | (........................) |  |
| 1. Pendapatan di terima dimuka atas sewa tanah 2020 (Dinas Perdagangan) | (........................) |  |
| 1. Pendapatan di terima dimuka atas sewa tanah 2020 (RSU Pasiririan) | (........................) |  |
| 1. Pendapatan di terima dimuka atas sewa tanah 2020 (Dinas Pariwisata) | (........................) |  |
| 1. Pendapatan di terima dimuka atas sewa tanah 2020 (Dinas Pertanian) | (........................) |  |
| **Jumlah Pengurangan** |  | (........................) |
| **Lain-lain PAD Yang Sah - LO** |  | **........................** |

### 

### Lain-lain Pendapatan Yang Sah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| Pendapatan Hibah - LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan hibah tahun 2021 dan 2020masing-masing sebesar Rpxxxdan Rpxxxsebagai berikut.

**Tabel 18.Daftar Pendapatan Hibah – LRA dan LOTahun 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Jumlah (Rp)** |
| **1** | **Pendapatan Hibah LRA** |  |
|  | Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perkotaan |  |
|  | Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perdesaan |  |
|  | **Jumlah Pendapatan LRA** |  |
| **2** | **Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat** |  |
|  | Hibah dari pemerintah pusat |  |
|  | Hibah dari Pemerintah Propinsi |  |
|  | Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta |  |
|  | Hibah dari kelompok masayarakat/perorangan |  |
| **3** | **Jumlah Pendapatan Hibah LO** |  |

**Tabel 19.Rincian Pendapatan Hibah – LOTahun 2021 dan2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Keterangan** | **SKPD** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perkotaan | BPKD |  |  |
| 2 | Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perdesaan | BPKD |  |  |
| 3 | Hibah barang (aset tetap) dari BNPB | BPBD |  |  |
| 4 | Hibah barang (aset tetap) truck tinja dari Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PU | DLH |  |  |
| 5 | Hibah barang (aset tetap) dari Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) | Dinas Kearsipan & Perpustakaan |  |  |
| 6 | Hibah barang (aset tetap) Kendaraan ambulan dari Kemnterian Kesehatan | Dinas Kesehatan |  |  |
| 7 | Hibah Barang Blockgrant (APBN) | Dinas Pendidikan |  |  |
| 8 | Hibah Barang Alokon dari Provinsi | Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan |  |  |
| 9 | Hibah Barang vaksin dari dinkes propinsi | Dinas Kesehatan |  |  |
| 10 | Hibah obat dari Dinkes Propinsi | Farmasi |  |  |
| 11 | Hibah Dana BOS | Dinas Pendidikan |  |  |
| 12 | Hiibah barang (aset tetap) alat-alat bengkel dari Propinsi | Dinas Perdagangan |  |  |
| 13 | Hibah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinkes Propinsi | Puskesmas PASIRIAN |  |  |
| 14 | Hibah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinkes Propinsi | Puskesmas PADANG |  |  |
| 15 | Hibah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinkes Propinsi | Puskesmas KEDUNGJAJANG |  |  |
|  | **Jumlah** | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Pendapatan Lainnya – LO | **........................** |  | **........................** |

Pendapatan lainnya yang diterima Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

**Tabel 20.Daftar Pendapatan Lainnya Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2021** | **2020** |
| 1 | Bantuan keuangan peningkatan pendidikan-LO |  |  |
| 2 | Bantuan keuangan peningkatan pelayanan kesehatan |  |  |
| 3 | Bantuan keuangan peringatan hari jadi Prop. Jatim |  |  |
| 4 | Bantuan Keuangan Program Jalin Matra |  |  |
| 5 | Sumbangan Pihak ke tiga |  |  |
| 6 | Pendapatan Lain-lain |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |

### b. BEBAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| Beban Pegawai-LO | **........................** |  | **........................** |

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2021 dan2020, sebagai berikut.

**Tabel 21.Perhitungan Beban PegawaiTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **Uraian** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- |
| Belanja Gaji Pegawai LRA |  |  |
| **DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar** |  |  |
| Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai (gaji pokok, dll)/Gaji susulan |  |  |
| Uang lembur PNS 2017 belum dibayar (RSUD Dr. Haryoto) |  |  |
| Tunjangan Uang makan 2017 belum di bayar |  |  |
| Honorarium Pelayanan Kesehatan 2017 Belum Dibayar (PNS) |  |  |
| Honorarium Pelayanan Kesehatan 2017 Belum Dibayar (Non PNS) |  |  |
| Beban pegawai tahun lalu yang belum dibayar (utang belanja) |  |  |
| Beban pegawai BOS |  |  |
| **DIKURANGI :** |  |  |
| Kapitalisasi beban honorarium (Dinas Perhubungan) menambah aset tetap Bangunan Monumen (MP/REKLAS AT/DISHUB/015) | (........................) |  |
| Bayar utang Hr. Pelayanan kesehatan tahun 2016 | (........................) | (....................) |
| **Jumlah Belanja Pegawai Lo** |  |  |

**Tabel 22.Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Per SKPDTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **SKPD** | **Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai** | **Lembur Belum di bayar** | **Utang Tunjangan Uang Makan** | **Utang Hr. Pelayanan Kesehatan (PNS** | **Utang Hr. Pelayanan Kesehatan (Non PNS)** | **Jumlah Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2020** | **Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RSUD dr. HARYOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DINAS KESEHATAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PUSK. TEMPURSARI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PUSK. PRONOJIWO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PUSK. CANDIPURO |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PUSK. PENANGGAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PUSK. PASIRIAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PUSK. BADES |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PUSK. TEMPEH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |  |  |  |  |  |

Pada tahun 2020 di dalam belanja pegawai terdapat realisasi beban honorarium sebesar Rpxxx pada kegiatan pembangunan bangunan monumen (Dinas Perhubungan) yang harus dikapitalisasi menambah aset tetap bangunan monumen, sehingga dikurangkan terhadap beban pegawai karena bukan merupakan bagian dari beban pegawai, terinci sebagai berikut.

**Tabel 23.Daftar Beban honorarium (Dinas Perhubungan) Dikapitalisasi Menambah Aset Tetap Bangunan Monumen**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Daftar Honorarium** | **2021** | **2020** |
| 1 | Honorarium pengadaan barang/jasa |  |  |
| 2 | Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan |  |  |
| 3 | Honorarium penerima hasil pekerjaan |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |

**Tabel 24.Daftar Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun Lalu**

*dalam rupiah*

| **No** | **Nama SKPD** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Pengelola Keuangan Daerah |  |  |
| 2 | RSUD dr. HARYOTO |  |  |
| 3 | Dinas Kesehatan - Puskesmas TEKUNG |  |  |
| 4 | Dinas Kesehatan - Puskesmas ROGOTRUNAN |  |  |
| 5 | Dinas Kesehatan - Puskesmas PADANG |  |  |
| 6 | Dinas Kesehatan - Puskesmas KUNIR |  |  |
| 7 | Dinas Kesehatan - Puskesmas KLAKAH |  |  |
| 8 | Dinas Kesehatan - Puskesmas TEMPEH |  |  |
| 9 | Dinas Kesehatan - Puskesmas SUMBERSARI |  |  |
| 10 | Dinas Kesehatan - Puskesmas BADES |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Beban Barang dan Jasa-LO | **837.730.642** |  | **837.730.642** |

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel25.Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Beban Barang dan Jasa** | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban Persediaan | 411.577.430 | 332.904.361 |
| 2 | Beban Jasa | 535.737.753 | 451.715.505 |
| 3 | Beban Pemeliharaan | 6.163.500 | 16.837.245 |
| 4 | Beban Perjalanan Dinas | 19.650.000 | 9.003.531 |
| 5 | Beban Lainnya | - | 1.000.000 |
| 6 | Beban Pegawai | 20.804.760 | 26.270.000 |
|  | **Jumlah** | **993.933.443** | **837.730.642** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| **Beban Persediaan** | **411.577.430** |  | **332.904.361** |

Beban persediaan mencerminkan barang-barangpersediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut.

**Tabel 26.Daftar Rincian Beban PersediaanTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **2021** | **2020** |
| 1. Belanja Persediaan LRA | 411.577.430 | 332.904.361 |
| Ditambah | - | - |
| 1. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu | - | - |
| 1. Koreksi persediaan awal | - | - |
| 1. Hibah persediaan obat dari Pemerintah Provinsi | - | - |
| 1. Reklasifikasi Belanja Modal BOS menambah persediaan | - | - |
| 1. Koreksi persd. Suku cadang puskesmas senduro | - | - |
| 1. Beban persediaan 2017 yang masih harus di bayar | - | - |
| 1. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5+6+7) | - | - |
| 1. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+8) | - | - |
| Dikurangi | - | - |
| 1. Utang beban persedian tidak menambah persediaan (RSUD) | - | - |
| 1. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember. | - | - |
| 1. Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat | - | - |
| 1. Reklasifikasi beban persediaan ke baban hibah (gazebo) pariwisata | - | - |
| 1. Penerimaan hibah PMT Pusk. Gucialit di catat terlalau tinggi | - | - |
| 1. Pembayaran utang belanja tahun lalu | - | - |
| 1. Hibah persediaan ke luar | - | - |
| 1. Jumlah Pengurangan (10+11+12+13+14+15+16) |  |  |
| 1. Beban Persediaan (9(17) | **411.577.430** | **322.904.361** |

**Tabel27.Daftar Rincian Beban PersediaanTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No.** | **Beban Persediaan** | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban alat tulis kantor | 15.502.690 | 10.551.000 |
| 2 | Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) | 860.800 | 565.000 |
| 3 | Beban perangko, materai, dan benda pos lainnya | 3.000.000 | 900.000 |
| 4 | Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih |  | 1.205.850 |
| 5 | Beban bahan makanan |  | 79.755.751 |
| 6 | Beban bahan baku praktek/pelatihan |  | 831.850 |
| 7 | Beban perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek |  | 10.796.150 |
| 8 | Beban cetak | 3.676.600 | 1.075.000 |
| 9 | Beban penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan |  | 3.188.760 |
| 10 | Beban makanan dan minuman rapat | 298.650.000 | 206.960.000 |
| 11 | Beban makanan dan minuman tamu |  | 375.000 |
| 12 | Beban pakaian batik tradisional | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 13 | Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 59.200.000 | 1.800.000 |
| 14 | Beban bahan bakar dan pelumas | 8.088.060 |  |
| 15 | Beban bahan lainnya | 13.499.280 |  |
| 16 | Beban pakaian olahraga | 4.200.000 |  |
|  | **Jumlah Beban Persediaan** | **411.577.430** | **322.904.361** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| **Beban Jasa** | **535.737.753** |  | **451.715.505** |

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 535.737.753 dan Rp451.715.505.

**Tabel 28.Daftar Rincian Beban JasaTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Jenis Beban Jasa** | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban telepon | 893.666 | 976.260 |
| 2 | Beban air | 553.550 | 615.950 |
| 3 | Beban listrik | 7.572.500 | 4.302.500 |
| 4 | Beban surat kabar/majalah | 2.475.000 | 2.700.000 |
| 5 | Beban kawat/faksimili/internet | 4.983.709 | 4.943.500 |
| 6 | Beban dekorasi |  | 1.239.000 |
| 7 | Beban penggantian transport |  | 94.940.000 |
| 8 | Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli |  | 3.600.000 |
| 9 | Beban jasa pendukung kegiatan |  | 1.500.000 |
| 10 | Beban jasa/insentif RT/RW |  | 187.200.000 |
| 11 | Beban premi asuransi kesehatan | 9.515.040 | 7.631.855 |
| 12 | Beban premi asuransi ketenagakerjaan |  | 599.440 |
| 13 | Beban upah/ongkos tenaga admnistrasi | 309.600.000 | 140.400.000 |
| 14 | Beban upah tenaga kebersihan | 18.000.000 | 1.067.000 |
| 15 | Beban upah tenaga keamanan | 18.000.000 |  |
| 16 | Beban jasa penyelenggara acara | 123.800.000 |  |
| 17 | Beban jasa pengolahan sampah | 550.000 |  |
| 18 | Beban lembur | 38.955.000 |  |
| 19 | Beban iuran jaminan kecelakaan kerja | 659.288 |  |
| 20 | Beban iuran jaminan kematian | 180.000 |  |
|  | **Jumlah** | **535.737.753** | **451.715.505** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| **Beban Pemeliharaan** | **6.163.500** |  | **16.837.245** |

Beban pemeliharaan pada Kelurahan Jogotrunan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rpdan Rp16.837.245

**Tabel 29.Daftar Rincian Beban PemeliharaanTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Beban Pemeliharaan** | **Tahun 2021** | **Tahun 2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban bahan bakar minyak dan pelumas |  | 5.400.245 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Alat-Alat Besar Darat |  |  |
| 3 | Beban jasa sevis dan peggantian suku cadang |  | 2.545.500 |
| 4 | Beban STNK |  | 490.500 |
| 5 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 2.323.500 |  |
| 6 | Beban Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor |  |  |
| 7 | Beban Pemeliharaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor |  |  |
| 8 | Beban Pemeliharaan Alat Pendingin | 1.075.000 |  |
| 9 | Beban Pemeliharaan Alat Bengkel Tak Bermesin |  |  |
| 10 | Beban Pemeliharaan Alat Ukur |  |  |
| 11 | Beban Pemeliharaan Alat Pengolahan |  |  |
| 12 | Beban Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan |  |  |
| 13 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor |  |  |
| 14 | Beban Pemeliharaan peralatan komputer | 1.890.000 | 1.240.000 |
| 15 | Beban Pemeliharaan Komputer | 875.000 | 1.161.000 |
| 16 | Beban Pemeliharaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat |  |  |
| 17 | Beban Pemeliharaan Alat Studio |  |  |
| 18 | Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi |  |  |
| 19 | Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar |  |  |
| 20 | Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran |  |  |
| 21 | Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan |  |  |
| 22 | Beban Pemeliharaan Unit Unit Laboratorium |  |  |
| 23 | Beban Pemeliharaan Alat Peraga/Praktek Sekolah |  |  |
| 24 | Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup |  |  |
| 25 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja/kantor |  | 6.000.000 |
| 26 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal |  |  |
| 27 | Beban Pemeliharaan Monumen/Bangunan Bersejarah |  |  |
| 28 | Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti |  |  |
| 28 | Beban Pemeliharaan Rambu(Rambu Lalu Lintas Darat |  |  |
| 29 | Beban Pemeliharaan Jalan |  |  |
| 30 | Beban Pemeliharaan Jembatan |  |  |
| 31 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi |  |  |
| 32 | Beban Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam |  |  |
| 33 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air Kotor |  |  |
| 34 | Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih |  |  |
| 35 | Beban Pemeliharaan Instalasi Air Kotor |  |  |
| 36 | Beban Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah |  |  |
| 37 | Beban Pemeliharaan Instalasi Gardu Listrik |  |  |
| 38 | Beban Pemeliharaan Jaringan Air Minum |  |  |
| 39 | Beban Pemeliharaan Jaringan Listrik |  |  |
| 40 | Beban Pemeliharaan Jaringan Telepon |  |  |
| 41 | Beban Pemeliharaan Aset tetap Lainnya |  |  |
| 42 | Beban Pemeliharaan Aset Lainnya |  |  |
| 43 | Beban Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung |  |  |
|  | **Jumlah** | **6.163.500** | **16.837.245** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| **Beban Perjalanan Dinas** | **19.650.000** |  | **9.003.531** |

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut:

**Tabel 30.Daftar Beban Perjalanan DinasTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Beban Perjalanan Dinas** | **2021** | **2020** |
| 1 | Beban Perjalanan Dinas |  |  |
| 2 | Beban perjalanan dinas dalam daerah | 17.550.000 | 5.875.000 |
| 3 | Beban perjalanan dinas luar daerah | 2.100.000 | 3.128.531 |
|  | **Jumlah Beban Perjalanan Dinas** | **19.650.000** | **9.003.531** |

**Tabel 31.Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Nama Akun** | **Belanja Perjalanan Dinas LRA** | **Beban Perjalanan Dinas 2021 Terutang** | **Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2020** | **Beban Perjalanan Dinas LO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 17.550.000 |  |  | 17.550.000 |
| 2 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 2.100.000 |  |  | 2.100.000 |
|  | **Jumlah** | **19.650.000** |  |  | **19.650.000** |

Pembayaran perjalanan dinas tahun 2021 sebesar R 19.650.000 merupakan pembayaran beban perjalanan dinas pada Kelurahan Jogotrunan. Sedangkan beban perjalanan dinas tahun 2020 yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut.

**Tabel 32.Daftar Utang Beban Perjalanan DinasTahun 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama SKPD** | **Perjalanan Dinas Dalam daerah** | **Perjalanan Dinas Luar daerah** | **Jumlah Utang Perjalanan Dinas** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| **Beban Lainnya** | **........................** |  | **........................** |

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp**,-**dan Rp ,-sebagai berikut.

**Tabel 33.Daftar Rincian Beban Lain-lain LRA dan LOTahun 2021**

*dalam rupiah*

| **No** | **Uraian** | **Jumlah** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **BELANJA LAINNYA – LRA** | |  |  |
| **PENAMBAHAN** | |  |  |
| 1 | Beban 2021 belum dibayar (kel. Jogotrunan) |  |  |
| 2 | Reklasifikasi Belanja Modal ke belanja/beban lainnya (barang ekstrakomtabel) karena tidak menambah aset tetap |  |  |
|  | Reklasifikasi dari Belanja Modal (aset tetap) ke barang ekstrakomtabel pada RSUD Dr. Haryoto |  |  |
|  | Dinas Lingkungan Hidup (belanja alat ukur lainnya) |  |  |
|  | Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang (belanja alat ukur lainnya) |  |  |
|  | Dinas Lingkungan Hidup (Belanja alat timbangan) |  |  |
|  | Reklasi dari Peralatan panen hasil pertanian dan perkebunan ke belanja lainnya brg. Ekastrakomtabel (Dinas Pertanian) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari belanja modal peralatan kantor (Set. DPRD) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari belanja modal peralatan kantor (RSUD Dr. Haryoto) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari Bel. Modal mebeler tidak menambah aset tetap. (Dinas Arsip & Perpustakaan) |  |  |
|  | Reklasi ke belanja lainnya dari Bel. Modal kursi lipat tdk menambah aset tetap (Dinas Kominfo) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari Belanja modal kursi lipat tdk menambah aset tetap (Dinas Perdagangan) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari Belanja modal kursi lipat tdk menambah aset tetap (Kecamatan Senduro) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari BM peralatan kantor tidak menambah aset tetap (ekstrakomtabel) Dinas Kominfo) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari belanja modal alat kedokteran umum tidak menambah aset tetap (Puskesmas Ranuyoso) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari belanja modal alat kedokteran umum tidak menambah aset tetap (Puskesmas Candipuro) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari belanja modal alat kedokteran umum tidak menambah aset tetap (puskesmas Tempeh) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari belanja modal alat kedokteran umum tidak menambah aset tetap (RSUD Pasirian) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari belanja modal alat kedokteran umum tidak menambah aset tetap (RSUD Dr. Haryoto) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari Bel. Modal gedung dan bangunan tdk menambah aset tetap (BPRD) |  |  |
|  | Reklas ke belanja klainnya dari BM. Tugu peringatan tdk menambah aset tetap (Bag. Admin. Pemerintahan) |  |  |
|  | Reklas ke belanja lainnya dari Belanja Modal Bangunan Monumen ke belanja rambu tak bersuar tidak menambah aset tetap (Dinas Pariwisata) |  |  |
| **PENGURANGAN :** | |  |  |
| 1 | Reklasifikasi belanja/beban lainnya menambah aset tetap |  |  |
|  | Puskesmas Senduro |  |  |
|  | Dinas Pendidikan |  |  |
|  | RSUD Pasirian |  |  |
|  | RSUD Dr. Haryoto |  |  |
|  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Dinas Perhubungan |  |  |
|  | **BEBAN LAINNYA LO** |  |  |

**Tabel 34.Daftar Rincian Beban Lain-lain (Beban atas Barang – barang Ekstrakomtabel)Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **Beban Lainnya** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beban Alat (Alat Besar Darat |  |  |
| 2 | Beban Alat-alat Bantu |  |  |
| 3 | Beban Alat Angkutan Darat Tak Bermotor |  |  |
| 4 | Beban Alat Bengkel Bermesin |  |  |
| 5 | Beban Alat Bengkel Tak Bermesin |  |  |
| 6 | Beban Alat Ukur |  |  |
| 7 | Beban Alat Pengolahan |  |  |
| 8 | Beban Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan |  |  |
| 9 | Beban Alat Kantor |  |  |
| 10 | Beban Alat Rumah Tangga |  |  |
| 11 | Beban Komputer |  |  |
| 12 | Beban Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat/meubelair |  |  |
| 13 | Beban Alat Studio |  |  |
| 14 | Beban Alat Komunikasi |  |  |
| 15 | Beban Peralatan Pemancar |  |  |
| 16 | Beban Alat Kedokteran |  |  |
| 17 | Beban Alat Kesehatan |  |  |
| 18 | Beban Unit Unit Laboratorium |  |  |
| 19 | Beban Alat Peraga/Praktek Sekolah |  |  |
| 20 | Beban Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan |  |  |
| 21 | Beban Peralatan Laboratorium Hidrodinamika |  |  |
| 22 | Beban Persenjataan Non Senjata Api |  |  |
| 23 | Beban Bangunan Gedung Tempat Kerja |  |  |
| 24 | Beban Bangunan Menara |  |  |
| 25 | Beban Tugu Titik Kontrol/Pasti |  |  |
| 26 | Beban Rambu(Rambu Lalu Lintas Darat |  |  |
| 27 | Beban Bangunan Air Kotor |  |  |
| 28 | Beban Buku |  |  |
| 29 | Beban Terbitan Berkala |  |  |
| 30 | Beban Barang-barang Perpustakaan |  |  |
| 31 | Beban Barang Bercorak Kebudayaan |  |  |
| 32 | Beban Alat Olah Raga Lainnya |  |  |
| 33 | Beban Hewan |  |  |
| 34 | Beban Tanaman |  |  |
| 35 | Beban Barang dan Jasa dana BOS |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| Beban Penyusutan danAmortisasi | **54.559.682,44** |  | **54.094.719,94** |

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2020masing-masing sebesar Rp54.094.719,94 dan Rp54.094.719,94 sebagai berikut.

**Tabel 35.Daftar Beban Penyusutan dan AmortisasiTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Beban Penyusutan** | | **Tahun 2021** | | | **Tahun 2020** | |
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | | 33.440.417,50 | | | 32.975.455,00 | |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | 21.119.264,94 | | | 21.119.264,94 | |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan | |  | | |  | |
| 4 | Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya | |  | | |  | |
|  | Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap | |  | | |  | |
| 5 | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | |  | | |  | |
|  | **Jumlah** | | **54.559.682,44** | | | **54.094.719,94** | |
|  | | | **31 Desember 2021**  **(Rp)** | |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** | |
| Beban Penyisihan Piutang | | | **-** | |  | **-** | |

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp,-dan Rp,- menambah jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2021.

**Tabel 36.Rincian Beban Penyisihan PiutangTahun 2021**

*dalam rupiah*

| **Beban Penyisihan Piutang** | **Beban Penyisihan Piutang** |
| --- | --- |
| **BEBAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK** |  |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame |  |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |  |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran |  |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan |  |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah |  |
| Beban Penyisihan Piutang PBB P2 |  |
| Beban Penyisihan Piutang PPj PLN |  |
| **Jumlah (1)** |  |
| **BEBAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI** |  |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes) |  |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (labkes) |  |
| Beban Penyisihan Piutang Retr. Pelayanan Kesehatan (puskesmas) |  |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar |  |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah |  |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal |  |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) |  |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) |  |
| Beban Penyisihan Piutang Ret. Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian |  |
| **Jumlah (2)** |  |
| **BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA** |  |
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD |  |
| Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Modal Kepada Msayarakat |  |
| Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi |  |
| Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat |  |
| Beban Penyisihan Piutang lainnya kerugian daerah |  |
| Beban Penyisihan Piutang Sewa Kebun Dinas |  |
| Beban Penyisihan Piutang Iuran Pelaksanaan Pendidikan |  |
| **Jumlah (3)** |  |
| **JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG (1+2+3)** |  |

### c.Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Defisit Penghapusan Aset NonLancar | **-** |  | **-** |  |

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp**........................**) dan (Rp**........................**). Defisit penghapusan aset non lancar tahun 2020merupakan defisit kegiatan non operasional lainnya karena penyerahan aset tetap dan saldo kas BOS SMAN/SMKN/SDLB ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sedangkan tahun 2019merupakan defisit karena penghentian aset non lancar dari pemakaian, terinci sebagai berikut.

**Tabel 37.Defisit Penghapusan Aset Non LancarTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **No** | **SKPD** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |
| 2 | KECAMATAN PASRUJAMBE |  |  |
| 3 | KECAMATAN RANDUAGUNG |  |  |
| 4 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |  |
| 5 | KECAMATAN LUMAJANG |  |  |
| 6 | KECAMATAN PASIRIAN |  |  |
| 7 | KECAMATAN SUKODONO |  |  |
| 8 | KECAMATAN SUMBERSUKO |  |  |
| 9 | KECAMATAN KUNIR |  |  |
| 10 | KECAMATAN TEKUNG |  |  |
|  | **Jumlah** |  |  |

**Tabel38.Rincian Defisit Penghapusan Aset Non LancarTahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| **NO** | **Nama Akun** | **JUMLAH** | **Nama SKPD** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PESEDIAAN** |  |  |  |
| 1 | Persediaan Alat Tulis Kantor |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 2 | Persediaan Barang cetakan |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
|  | **Jumlah (1)** |  |  |  |
|  | **TANAH** |  |  |  |
| 1 | Tanah Kantor |  | Ex.Dinas Kehutanan, Akper | Provinsi Jatim dan Kemenristek Dikti |
| 2 | Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Lanjutan |  | Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim |
|  | **Jumlah (2)** |  |  |  |
|  | **PERALATAN DAN MESIN** |  |  |  |
| 1 | Alat-alat Berat |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 2 | Akumulasi Penyusutan Alat-alat Berat |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 3 | Alat-alat Angkutan Darat Bermotor |  | Ex.Dinas Kehutanan, Akper | Provinsi Jatim dan Kemenristek Dikti |
| 4 | Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor |  | Ex.Dinas Kehutanan, Akper | Provinsi Jatim dan Kemenristek Dikti |
| 5 | Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 6 | Akumulasi Penyusutan Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 7 | Peralatan Kantor |  | Ex.Dinas Kehutanan Akper, Dishub, Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim dan Kemenristek Dikti |
| 8 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor |  | Ex.Dinas Kehutanan, Akper, Dishub, Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim dan Kemenristek Dikti |
| 9 | Perlengkapan Kantor |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 10 | Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 11 | Komputer mainframe/server |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 12 | Komputer/PC |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 13 | Akumulasi Penyusutan Komputer |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 14 | Meubelair |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 15 | Buffet |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 16 | Akumulasi Penyusutan Mebelair |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 17 | Peralatan Dapur |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 18 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Dapur |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 19 | Alat-alat Studio |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 20 | Akumulasi Penyusutan Alat-alat Studio |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
|  | **Jumlah (3)** |  |  |  |
|  | **GEDUNG** |  |  |  |
| 1 | Gedung Kantor |  | Ex.Dinas Kehutanan, Akper, Dishub | Provinsi Jatim dan Kemenristek Dikti |
| 2 | Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 3 | Gedung sekolah menengah atas dan kejuruan |  | Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim |
| 4 | Akumulasi Penyusutan Gedung Sekolah |  | Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim |
|  | **Jumlah (4)** |  |  |  |
|  | **ASET TETAL LAINNYA** |  |  |  |
| 1 | Lukisan/foto |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 2 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 3 | Buku (Buku Kepustakaan |  | Akper, Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim dan Kemenristek Dikti |
| 4 | Peralatan musik |  | Akper | Kementerian Riset dan Dikti |
|  | **Jumlah (5)** |  |  |  |
|  | **KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN** |  |  |  |
| 1 | Kontruksi Dalam Pekerjaan |  | Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim |
|  | **Jumlah (6)** |  |  |  |
|  | **ASET LAINNYA** |  |  |  |
| 1 | Kajian |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 2 | Software |  | Akper, Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim dan Kemenristek Dikti |
| 3 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya |  | Ex.Dinas Kehutanan, Akper, Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim dan Kemenristek Dikti |
| 4 | Aset Lain-lain |  | Ex.Dinas Kehutanan, Dishub, Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim |
|  | **Jumlah (7)** |  |  |  |
|  | **JALAN, IRIGASI & JARINGAN** |  |  |  |
| 1 | Jaringan irigasi/waduk/bendungan |  | Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim |
| 2 | Akumulasi Penyusutan Jaringan Air |  | Dinas Pendidikan | Provinsi Jatim |
|  | **Jumnlah (8)** |  |  |  |
|  | **UTANG BELANJA** |  |  |  |
| 1 | Utang Belanja Jasa |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
|  | **Jumlah (9)** |  |  |  |
|  | **BEBAN** |  |  |  |
| 1 | Beban alat tulis kantor |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
| 2 | Beban cetak |  | Ex.Dinas Kehutanan | Provinsi Jatim |
|  | **Jumlah (10** |  |  |  |
|  | **KAS LAINNYA** |  |  |  |
| **1** | Kas BOS |  | **Dinas Pendidikan** | Provinsi Jatim |
|  | **Jumlah (11)** |  |  |  |
|  | **Jumlah (1) s/d (11)** |  |  |  |

### 

### Surplus (Defisit) LO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember**  **2020**  **(Rp)** |
| Surplus (Defisit) LO | **1.048.493.125,44** |  | **881.825.361,94** |

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

**Tabel 39.Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Surplus (defisit)** | **2020** | **2020** |
| 1 | Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi | 1.048.493.125,44 | 881.825.361,94 |
| 2 | Surplus (Defisit) Non Operasi |  |  |
| 3 | Pos Luar Biasa |  |  |
|  | **Jumlah** | **1.048.493.125,44** | **881.825.361,94** |

## 3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Ekuitas Awal | **1.680.066.007,59** |  | **1.680.066.007,59** |

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp 1.857.181.557,65 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020*audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp1.680.066.007,59merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 20219*audited.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Surplus (Defisit) LO | **1.048.493.125,44** |  | **881.825.361,94** |

Surplus (defisit) LO adalah beban pegawai di tambah beban barang dan jasa dan juga beban penyusutan selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

**Tabel 40.Surplus/Defisit LO**

**Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2021** | **2020** |
| 1 | Beban Pegawai | 20.804.760 | 26.270.000 |
| 2 | Beban Barang dan jasa | 973.128.683 | 801.460.642 |
| 3 | Surplus/Defisit Dari Operasional (1-2) |  |  |
| 4 | Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional |  |  |
| 5 | Beban Penyusutan | 54.559.682,44 | 54.094.719,94 |
| 6 | Surplus/Defisit LO (1+2+5) | 1.048.493.125,44 | 881.825.361,94 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Dampak KumulatifPerubahanKebijakanAkuntansi/ KesalahanMendasar | **-** |  | **-** |

Pada Tahun 2020 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo ekuitas Tahun 2019 yang berdampak pada penurunan akuitas sebesar Rpxxx. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi kesalahan saldo awal yang berdampak pada penurunan ekuitas awal sebesar Rpxxxantara lain:

1. Koreksi Nilai Pajak Penerangan Jalan Rpxxx;
2. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang (Rpxxx);
3. Koreksi Nilai Persediaan (Rpxxx);
4. Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Rpxxx;
5. Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Rpxxx);
6. Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rpxxx);
7. Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Rpxxx;
8. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rpxxx);
9. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rpxxx);
10. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi Rpxxx;
11. Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi (Rpxxx);
12. Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi (Rpxxx);
13. Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rpxxx); dan
14. Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Rpxxx.

Rincian dampak kumulatif tersaji pada rincian dibawah ini:

1. **Koreksi Nilai Pajak Penerangan Jalan Rpxxx**

Koreksi Nilai Pajak Penerangan Jalan Rpxxx berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 41.Koreksi Nilai Pajak Penerangan Jalan**  *dalam rupiah* | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |  | KOREKSI TAHUN BERJALAN ATAS PIUTANG PPJ TAHUN 2016 |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Penyisihan Piutang (Rpxxx)**

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang (Rpxxx) berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 42.Koreksi Nilai Penyisihan Piutang**  *dalam rupiah* | | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |  | KOREKSI TAHUN BERJALAN ATAS PENYISIHAN PIUTANG PPJ TAHUN 2021 |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan Rpxxx berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 43.Koreksi Nilai Persediaan**  *dalam rupiah* | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | DINAS KESEHATAN |  | Mencatat koreksi persediaan vaksin yang dicatat terlalu tinggi |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Rpxxx**

Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Rpxxx berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 44.Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah**  *dalam rupiah* | | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |  | Koreksi saldo awal dari hasil penilaian aset tetap tanah di bawah badan jalan dan tanah dibangunan irigasi |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN |  | Mencatat Koreksi Saldo Awal Tanah |
|  |  |  | Mencatat Validasi Data Tanah Dengan Aprasial 2003 |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Rpxxx)**

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Rpxxx) berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 45.Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  *dalam rupiah* | | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GESANG |  | Mencatat koreksi aset saldo awal karena masih ada barang ekstrakonTabel |
| 2 | DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN |  | Koreksi nilai saldo awal aset tetap dikeluarkan menjadi barang extrakomptabel |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rpxxx)**

Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rpxxx) berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 46.Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan**  *dalam rupiah* | | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |  | Mencatat kurang catat pelimpahan gedung dari Dinas Perkebunan Daerah Prop. Jatim Tahun 1992 |
| 2 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  | Mencatat Aset Tetap Tahun 2016 Sebagai Extracomptabel |
| 3 | DINAS PERDAGANGAN |  | Mencatat Koreksi Saldo Awal Gedung Dan Bangunan Yang Kurang Catat |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Rp,-**

Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Rpxxx berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 47.Koreksi Aset Tetap Jalan dan Irigasi**  *dalam rupiah* | | | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |  | Koreksi saldo awal dari hasil penilaian aset tetap dari penilaian kembali bangunan jalan |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rpxxx)**

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rpxxx) berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 48.Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 4 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rpxxx)**

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rpxxx)berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 49.Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 2 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 4 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi Rpxxx**

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi Rpxxx berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut:

**Tabel 50.Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi**

*dalam rupiah*

| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
| 5 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  | Koreksi tahun berjalan atas akumulasi penyusutan tahun 2021 |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi (Rpxxx)**

Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi (Rpxxx) berdampak pada penurunan nilai akuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 51.Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi**  *dalam rupiah* | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |  | Koreksi tahun berjalan atas saldo awal aset lainnya TGR an. Mukrib, SP (Ka. UPT BPP Kec. Padang) sudah dibayar tapi periode sebelumnya |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi (Rp,-)**

Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi (Rpxxx) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 52. Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi**  *dalam rupiah* | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN |  | Koreksi kurang catat akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rpxxx)**

Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rpxxx) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 53.Koreksi Nilai Aset Lain-lain**  *dalam rupiah* | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT |  | Mencatat Koreksi Kurang Catat Pada Aset Lain-Lain Tahun 2021 |
| 2 | DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG |  | Mencatat Koreksi Aset Lain-lain yang Lebih Catat |
| 3 | DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN |  | MENCATAT SALAH CATAT ASET LAIN-LAIN YANG SEHARUSNYA MERUPAKAN BARANG PAKAI HABIS |
| 4 | DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG |  | Mencatat koreksi penambahan aset lain ( lain yang kurang catat. |
| 5 | DINAS KETAHANAN PANGAN |  | Koreksi saldo awal karena kurang catat harga perolehan |
| 6 | DINAS PENDIDIKAN |  | Mencatat Pengembalian Belanja Modal Tahun 2021 karena barang tidak datang. |
| 7 | DINAS PERTANIAN |  | Mencatat mutasi aset ekstrakompaTabel ke aset Lain-lain |
| 8 | SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN UMUM |  | Salah Catat Aset Lain-lain ke Dalam Barang Ekstra KompeTabel tahun 2021 |
|  | **Jumlah** |  |  |

1. **Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Rpxxx**

Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Rpxxx berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabel54.Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka**  *dalam rupiah* | | | |
| **NO** | **SKPD** | **Nilai** | **Keterangan** |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN UMUM |  | Memo penyesuaian saldo awal pendapatan di terima di muka |
|  | **Jumlah** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2021**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| Ekuitas Akhir | **1.818.671.160,21** |  | **1.857.181.557,65** |

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

**Tabel 55.Laporan Perubahan Ekuitas**

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Keterangan** | **2021** | **2020** |
| 1 | Ekuitas Awal | 1.857.181.557,65 | 1.680.066.007,59 |
| 2 | Surplus (defisit) LO | (1.048.493.125,44) | (881.825.361,94) |
| 3 | Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar | - | - |
| **4** | **Ekuitas Akhir** | **1.818.671.160,21** | **1.857.181.557,65** |

# IV. INFORMASI NON KEUANGAN

* 1. **GAMBARAN UMUM KELURAHAN JOGOTRUNAN**

1. **LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN JOGOTRUNAN**

Kelurahan Jogotrunan merupakan salah satu Kelurahan dari 7 Kelurahan di Kecamatan Lumajang.Luas wilayah Kelurahan Jogotrunan 264.250 ha.Ketinggian daerah Kelurahan Jogotrunan adalah di 107 meter dari permukaan laut (mdpl).

Bataswilayah administrasi Kelurahan Jogotrunan, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jogoyudan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Bendo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tukum dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ditotrunan. Secara administrasi wilayah Kelurahan Jogotrunan meliputi 18 (delapan belas) wilayah Rukun Warga (RW).

1. **VISI DAN MISI KELURAHAN JOGOTRUNAN**
2. **Visi Kelurahan Jogotrunan**

“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Jogotrunan”

1. **Misi Kelurahan Jogotrunan**
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keberdayaan masyarakat
4. **KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI**

Lokasi Kelurahan Jogotrunan yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Kelurahan Jogotrunan mempunyai 1 tipe iklim yaitu Iklim Sedang, dengan rata-rata bulan kering 3 - 4 bulan pertahunnya.

1. **TOPOGRAFI**

Topografi Kelurahan Jogotrunan berada pada dataran alluvial. Kelurahan Jogotrunan terdiri dari dataran yang subur dengan abanyaknya Persawahan di wilayah Kelurahan Jogotrunan..Kelurahan Jogotrunan berada pada ketinggian 104 meter diatas permukaan laut (mdpl).

1. **TATA GUNA TANAH**

Luas wilayah administrasi Kelurahan Jogotrunan adalah 264.250 ha yang terbagi menjadi 18 Rukun Warga (RW). Tata guna tanah wilayah Kelurahan Jogotrunan meliputi:

1. Daerah Pemukiman
2. Lahan Sawah
3. Tegal
4. **KEPENDUDUKAN**

Dengan luas wilayah 264.250 ha Kelurahan Jogotrunan memiliki jumlah penduduk sebesar 8.713 jiwa dengan rincian Laki – Laki sebesar 4.318 jiwa dan Perempuan sebesar 4.395 jiwa.

Mayoritas Penduduk Kelurahan Jogotrunan beretnis Jawa dan Madura.Mayoritas Penduduk di Kelurahan Jogotrunan memeluk Agama Islam sebesar 8.300 jiwa dan sisanya memeluk agama Kristen dan Katholik .Mayoritas Penduduk Kelurahan Jogotrunan Bermatapencaharian sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pengusaha.

1. **STRUKTUR KELEMBAGAAN**

Pemerintahan Kelurahan yang merupakan penyelenggara pemerintahan yang paling bawah dan sebagai ujung tombak pembangunan, mempunyai peranan dan fungsi sebagai sumber data dan informasi, sebagai sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan, dan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembinaan peran serta masayarakat.

Tuntutan seorang aparat Pemerintah Kelurahan harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas kepada Pimpinan adalah modal utama dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, baik tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara menyeluruh dan merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kelurahan, khususnya Kelurahan Jogotrunan telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

1. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Bahwa Kelurahan Jogotrunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

1. **Lurah**

Lurah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di kelurahan. Lurah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Adapun Tugas – Tugas Lurah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan penayanan masyarakat
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum
5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
8. **Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis admnistratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kelurahan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah dan sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan aparat pelaksana dan staf sekretariat. Adapun tugas dari sekretaris adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan sekretariat Kelurahan
2. Menghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan kelurahan
3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kelurahan
4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
5. Pelaksanaan koordinasi penerapan ketatausahaan dan kearsipan
6. Pemberian informasi dan hubungan mmasyarakat
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Lurah
9. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah
10. **Kasi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan ,Ketenagakerjaan, pertanahan, dan ketentraman, serta ketertiban di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program kerja Seksi Pemerintahan
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan
3. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
4. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan catatan sipil
5. Melasanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta satuan Peerlindungan Masyarakat
6. Melaksanakan pembinaan di bidang pertanahan
7. Menyelenggarakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan Pedesaan (PBB-P2)
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
9. Memberikan saran dan petimbangan kepada Lurah
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah
11. **Kasi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pelayanan umum Kelurahan serta sarana dan prasarana Kelurahan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Adapun tugas dari Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program kerja Seksi Pelayanan Umum
2. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum
3. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan, dan sanitasi lingkungan
4. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
5. Melaksanakan pelayanan perijinan
6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum;
7. Memberian saran dan pertimbangan kepada Lurah
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah
9. **Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan dan pembangunan Masyarakat mempunyai tugas membantu Lurah dalam meningkatkan taraf hidup melalui kebijaksanaan pemarataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh pelosok kelurahan. Adapun tugas dari Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program kerja Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaandan Pembangunan Masyarakat
3. Memantapkan lembaga kemasyarakan kelurahan;
4. Pemantaban pola keterpaduan pembangunan Kelurahan melalui penyelenggaraan Munrenbangkel
5. Meningkatkan partisipasi dan pendayagunaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan
6. Mengkoordinasikan penyususnan bahan pembinaan/ fasilitasi bidang perekonomian, Pendidikan,kesehatan, keluarga berencna dan keluarga sejahtera
7. Mengkoodinasikan penyiapan sarana perkonomian dan pembangunan
8. Menghimpun dan pengolahan data perkonomian dan pembangunan
9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah
11. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Lurah
12. **Susunan Organisasi**

Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Jogotrunan sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016, bahwa perangkat Kelurahan Jogotrunan adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lurah | : | ARIF MUSTOFA, SAP |
| 2 | Sekretaris | : | ABDUL MAJID,S.AP |
| 3 | Kasi Tata Pemerintahan | : | ANDI ROCHMAN,SH |
| 4 | Kasi Pelayanan Umum | : | ENDANG SUSILOWATI |
| 5 | Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat | : | YUNI KUSWANTI |
| 6 | Staf Penunjang | : | 1. JOKO PRAYITNO |
|  |  |
| 7 | Staf Tenaga Kontrak | : | 1. M.APRI HARIYONO |
|  |  |  | 1. AGIS RAHMADHANTI |
|  |  |  | 1. HERA FAHMI ARINDA |
|  |  |  | 1. FERRY ARYO HARDONO |
|  |  |  | 1. LUTFIYAH |
|  |  |  | 1. SRI UTAMI |
|  |  |  | 1. DENY SEPTYAN |
|  |  |  | 1. MOHAMAD ADI RIFAI |

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi pemerintahan Kelurahan Jogotrunan telah terisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta program-program dari Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

# V. P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Kelurahan Jogotrunan tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Lumajang Kelurahan Jogotrunan tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
3. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Jogotrunan berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
4. Semua aset yang dimiliki oleh Kelurahan Jogotrunan.
5. Kewajiban(kewajiban Kelurahan Jogotrunan kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca).
6. Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Kelurahan Jogotrunan pada tanggal neraca.
7. Penggunaan kas selama satu periode akuntansi
8. Saldo kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
9. Laporan keuangan pokok SKPD Kecamatan Lumajang Kelurahan Jogotrunan tahun 2021 terdiri:
10. Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
11. Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kelurahan Jogotrunan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
12. Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Lumajang Kelurahan Jogotrunan pada tanggal 31 Desember 2021.
14. Serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.